



**ANALISIS KEBUTUHAN INVESTASI SEKTOR POTENSIAL DALAM
RANGKA MENDORONG TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023-2027**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ekonomi

Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan

Diajukan Oleh:

ZAHRANY NUR AMALIA UZMA

NIM. 19104388

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA JEMBER

**ANALISIS KEBUTUHAN INVESTASI SEKTOR POTENSIAL DALAM
RANGKA MENDORONG TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023-2027**

Nama : Zahransy Nur Amalia Uzma
NIM : 19104388
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Mata Kuliah Dasar : Ekonomi Regional dan Ekonomi Pembangunan
Dosen Pembimbing Utama : Drs. Farid Wahyudi, M.Kes
Dosen Pembimbing Asisten : Dra. Ratih Rakhmawati, MP
Telah disetujui :

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Asisten



Dr. Farid Wahyudi, M.Kes
NIDN. 0703036504


Dra. Ratih Rakhmawati, MP
NIDN. 0714126202

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Utama




Dr. Farid Wahyudi, M.Kes
NIDN. 0703036504

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA JEMBER

ANALISIS KEBUTUHAN INVESTASI SEKTOR POTENSIAL DALAM
RANGKA MENDORONG TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023-2027

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi pada:

Hari/Tanggal : Senin, 07 Agustus 2023

Jam : 10.00 – 11.30

Tempat : Ruang Sidang

Disetujui oleh Tim Penguji Skripsi:

Dr. Agustin H.P.,MM

(Ketua Penguji)

Dra. Ratih Rakhmawati, MP

(Sekretaris Penguji)


Drs. Farid Wahyudi, M.Kes.


(Anggota Penguji)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi
Pembangunan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Drs. Farid Wahyudi
NIDN. 0703036504


Dr. Muhammad Firdaus, SP., MM., MP., CIOaR
NIDN. 0008077101

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahrany Nur Amalia Uzma

NIM : 19104388

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Minat Studi : Ekonomi Pembangunan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: ANALISIS KEBUTUHAN INVESTASI SEKTOR POTENSIAL DALAM RANGKA MENDORONG TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023-2027 merupakan hasil karya ilmiah yang saya buat sendiri. Apabila terbukti pernyataan saya ini tidak benar maka saya siap menanggung resiko dibatakannya skripsi yang telah saya buat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan sejujurnya.

Jember, 24 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Zahrany Nur Amalia Uzma

MOTTO

Jangan membenci siapapun, tak peduli seberapa banyak kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Hiduplah dengan rendah hati, tak peduli seberapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif, tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Berikanlah banyak, meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalin hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu, maafkanlah orang yang berbuat salah padamu, dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang yang kau sayangi.

- Ali bin Abi Thalib -

If you start now, you will know a lot next year that you don't know now, and that you will not know next year, if you wait.

- William Feather -

Segala sesuatu yang menghancurkanmu pada akhirnya membuatmu lebih kuat.

- Gu Xiqiao -

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahrany Nur Amalia Uzma

NIM : 19104388

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Minat Studi : Ekonomi Pembangunan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: ANALISIS KEBUTUHAN INVESTASI SEKTOR POTENSIAL DALAM RANGKA MENDORONG TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023-2027 merupakan hasil karya ilmiah yang saya buat sendiri. Apabila terbukti pernyataan saya ini tidak benar maka saya siap menanggung resiko dibataalkannya skripsi yang telah saya buat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan sejujurnya.

Jember, 24 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Zahrany Nur Amalia Uzma

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan serta doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya persembahkan skripsi atau tugas akhir ini untuk:

1. Dua orang hebat dalam hidupku, Ayah dan Mama. Terima kasih atas setiap kepercayaan yang diberikan kepadaku sehingga aku bisa tumbuh menjadi versi terbaik diriku saat ini dan tentunya tidak akan pernah berhenti memperbaiki diri. Terima kasih selalu menemani langkahku, memberikan dorongan dan motivasi serta doa yang tiada putus-putusnya. Tanpa ayah dan mama tentunya hidupku tidak akan berjalan begitu mudah dan lancar, terima kasih telah menjadi orang tua terbaik untukku.
2. Kedua adik tersayang ananda Zahryan Ridho dan Zahryan Ilham yang memberikan motivasi kepadaku untuk menjadi figure kakak yang baik. Terima kasih atas semangat dan doanya.
3. Bapak Drs. Farid Wahyudi, M.Kes selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing, menasihati dan memberikan solusi agar penulis dapat menyelesaikan kuliah.
4. Ibu Dra. Ratih Rakhmawati, MP selaku Dosen Pembimbing Asisten yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt karena atas ridhonya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Adapun skripsi yang penulis ajukan berjudul “ANALISIS KEBUTUHAN INVESTASI SEKTOR POTENSIAL DALAM RANGKA MENDORONG TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023-2027”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana S-1 Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan di ITS Mandala Jember. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam proses penyelesaian skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa orang-orang tercinta di sekeliling penulis yang terus memberikan bantuan dan dukungan baik secara moral maupun spiritual. Oleh karena itu terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P selaku Rektor ITS Mandala Jember.
2. Bapak Dr. Muhammad Firdaus, SP., MM., MP., CIQaR selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ITS Mandala Jember.
3. Bapak Drs. Farid Wahyudi, M.Kes selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penyusunan skripsi dapat terlaksana dengan baik.

4. Ibu Dra. Ratih Rakhmawati, MP selaku Dosen Pembimbing Asisten yang telah bersedia memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penyusunan skripsi dapat terlaksana dengan baik.
5. Ibu Nurshadrida Kartika Sari, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat dan bimbingan dalam memilih mata kuliah.
6. Segenap dosen dan karyawan, terutama Dosen Ekonomi Pembangunan ITS Mandala yang telah memberikan ilmu dengan penuh kesabaran selama berkuliah di ITS Mandala Jember.
7. Kemenristekdikti yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menerima Beasiswa KIP Kuliah selama berkuliah di ITS Mandala Jember.
8. Untuk Tantri, Elvi dan Ike yang selalu menemani penulis dalam keadaan susah dan senang.
9. Untuk teman-teman Ekonomi Pembangunan angkatan 2019 yang telah menemani selama 4 tahun.

Pada akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis

Zahrany Nur Amalia Uzma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Batasan Masalah.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori.....	23
2.2.1 Teori Ekonomi Pembangunan.....	23
2.2.2 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah.....	28
2.2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	30
2.2.4 Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory).....	35
2.2.5 Teori Investasi.....	36
2.2.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	39
2.2.7 Konsep <i>Location Quotient</i> (LQ).....	43
2.2.8 Konsep <i>Shift Share</i> (SS).....	45
2.2.9 Konsep Model Rasio Pertumbuhan (MRP).....	47
2.2.10 Konsep <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR).....	48
2.3 Kerangka Konseptual.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	52

3.1	Tempat / Lokasi & Waktu Penelitian	52
3.1.1	Tempat / Lokasi Penelitian	52
3.1.2	Waktu Penelitian	52
3.2	Jenis Penelitian.....	52
3.3	Identifikasi Variabel.....	53
3.4	Definisi Operasional.....	53
3.4.1	Produk Domestik Regional Bruto.....	53
3.4.2	Sektor Potensial.....	54
3.4.3	Investasi	54
3.4.4	Pertumbuhan Ekonomi	55
3.5	Metode Pengumpulan Data	55
3.6	Metode Analisis Data	56
3.6.1	Metode <i>Location Quotient</i> (LQ).....	56
3.6.2	Metode <i>Shift Share</i> (SS)	58
3.6.3	Model Rasio Pertumbuhan (MRP)	60
3.6.4	Metode Analisis Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	63
3.6.5	Penentuan Bobot Penilaian Sektor Potensial	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		66
4.1	Hasil Penelitian	66
4.1.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian	66
4.1.2	Deskripsi Variabel Penelitian	67
4.2	Analisis Hasil Penelitian	76
4.2.1	Kontribusi Sektor Ekonomi	76
4.2.2	Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ).....	77
4.2.3	Analisis <i>Shift Share</i> (SS)	80
4.2.4	Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP).....	83
4.2.5	Analisis <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	86
4.2.6	Kebutuhan Investasi Sektor Potensial.....	89
4.3	Interpretasi Hasil Penelitian	91
4.3.1	Sektor Potensial Kabupaten Jember	91
4.3.2	Analisis ICOR Sektor Potensial Kabupaten Jember	97
4.3.3	Analisis Kebutuhan Investasi Sektor Potensial Kabupaten Jember	99
BAB V PENUTUP		104
5.1	Kesimpulan	104

5.2 Implikasi	105
5.3 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021	74
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Jember Tahun 2017-2021	76
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan nilai LQ Kabupaten Jember.....	79
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan <i>Shift Share</i> Kabupaten Jember 2017-2021	81
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan MRP Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember 2017-2021	84
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan <i>ICOR</i> Sektor Potensial Kabupaten Jember 2017-2021	87
Tabel 4.7 Kebutuhan Investasi Sektor Potensial Kabupaten Jember Tahun 2022	91
Tabel 4.8 Hasil Pembobotan	92
Tabel 4.9 Kebutuhan Investasi Sektor Potensial Kabupaten Jember Tahun 2023-2027.....	100
Tabel 4.10 Kebutuhan Investasi Sektor Potensial untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 6.5%.....	101
Tabel 4.11 Pertumbuhan Sektor Ekonomi Non Potensial Kabupaten Jember....	101
Tabel 4.12 Kebutuhan Total Investasi Kabupaten Jember Tahun 2027	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	51
Gambar 4.1 PDRB Kabupaten Jember Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Konstan 2010	68
Gambar 4.2 Jumlah Nilai Investasi Kabupaten Jember	72
Gambar 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2017-2021	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jember 2017-2021	112
Lampiran 2 PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Timur 2017-2021	113
Lampiran 3 Perhitungan <i>Shift Share</i> Kabupaten Jember 2017-2021	114
Lampiran 4 Perhitungan MRP Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember 2017-2021	115
Lampiran 5 Hasil Perhitungan ICOR Sektor Potensial Kabupaten Jember 2017-2021	116
Lampiran 6 Kebutuhan Investasi Sektor Potensial Kabupaten Jember Tahun 2022	116
Lampiran 7 Kebutuhan Investasi Sektor Potensial Kabupaten Jember Tahun 2023-2027	117
Lampiran 8 Kebutuhan Investasi Sektor Potensial untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 6.5%	117
Lampiran 9 Kebutuhan Total Investasi Kabupaten Jember Tahun 2027	118

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor apa saja yang menjadi sektor potensial di Kabupaten Jember dan seberapa banyak kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember serta menganalisa kegiatan atau sektor ekonomi yang dapat dikembangkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember dan Provinsi Jawa Timur dengan rentang waktu selama 5 tahun, yaitu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Location Quotient* (LQ), *Shift Share* (SS), Model Ratio Pertumbuhan (MRP) dan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) dengan metode analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat enam sektor potensial di Kabupaten Jember dari hasil pembobotan berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ), *Shift Share* (SS), dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) yaitu (1) Sektor Industri Pengolahan, (2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (3) Sektor Informasi dan Komunikasi, (4) Sektor Real Estat, (5) Sektor Jasa Pendidikan, (6) Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hasil perhitungan ICOR dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan investasi yang diperlukan apabila target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember sebesar 6,5 persen pada tahun 2027 maka sektor potensial perlu tumbuh sebesar 10 persen.

Kata kunci: PDRB, Sektor Potensial, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi

ABSTRACT

This study aims to find out what sectors are potential sectors in Jember Regency and how much investment is needed to encourage economic growth in Jember Regency and to analyze economic activities or economic sectors that can be developed. The data used in this study is secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics for Jember Regency and East Java Province with a span of 5 years, from 2017 to 2021. The analytical tools used in this study are Location Quotient (LQ), Shift Share (SS), Growth Ratio Model (MRP) and Incremental Capital Output Ratio (ICOR) with quantitative descriptive analysis method. The results of this study indicate that there are six potential sectors in Jember Regency from the weighting results based on Location Quotient (LQ), Shift Share (SS), and Growth Ratio Model (MRP) analysis, namely (1) Manufacturing, (2) Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles, (3) Information and Communication, (4) Real Estate Activities, (5) Education, (6) Human Health and Social Work Activities. ICOR calculation results can be used to calculate the required investment needs if the Jember Regency economic growth target is 6.5 percent in 2027, then the potential sector needs to grow by 10 percent.

Keywords: PDRB, Potential Sector, Economic growth, Investment

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses Pemerintah Daerah bekerja sama dengan semua pihak baik masyarakat dan swasta untuk mengelola sumber daya yang tersedia dan membentuk model kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Telah tertuang pada UU. No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang kemudian disempurnakan dengan UU. No. 25 Tahun 1999 dan UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang kemudian disempurnakan kembali dengan UU. No. 33 Tahun 2004 untuk mendukung proses pembangunan suatu daerah. Pemerintah daerah telah diberikan kebebasan dan wewenang untuk menentukan arah pembangunan daerah tersebut dengan harapan setiap daerah dapat mengelola sumber dayanya secara mandiri sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, tanpa melakukan praktik-praktik intensif yang merugikan daerah dan penduduknya.

Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peluang terbuka untuk melakukan verifikasi dalam pembangunan untuk mendorong pembangunan yang lebih maju. Mengingat tugas pemerintah daerah yang lebih luas dan tuntutan persyaratan pembangunan ekonomi, pemerintah daerah harus bekerja dan berperan secara aktif untuk mencapai keberhasilan yang mampu meningkatkan pendapatan, produksi, dan ekonomi dengan menerapkan kegiatan ekonomi potensial untuk

memenuhi kebutuhan daerah atau lokal, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk merespons terhadap permintaan pasar.

Faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu pembangunan daerah adalah proses perencanaan, karena pembangunan ekonomi tidak bisa hanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan atas pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang (Arsyad, 2004: 19).

Widodo (2006: 111) mengatakan kegiatan perencanaan pembangunan untuk mengembangkan sektor ekonomi dimulai dengan melakukan identifikasi sektor unggulan atau potensial ekonomi daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Ada dua faktor utama yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi potensi kegiatan ekonomi daerah. Pertama, sektor ekonomi yang unggul atau yang mempunyai daya saing dalam beberapa periode tahun terakhir dan kemungkinan prospek sektor ekonomi dimasa mendatang. Kedua, sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan dimasa mendatang walaupun pada saat ini belum mempunyai tingkat daya saing yang baik. Dengan teridentifikasinya potensi kegiatan ekonomi daerah maka dapat disusun kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tomi Kuntara (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pembangunan ekonomi daerah memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat daerah tersebut. Oleh karena itu diperlukan sebuah indikator untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercipta dari dampak proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Salah satu indikator utama untuk mengetahui tinggi atau rendahnya tingkat kesejahteraan suatu negara adalah dengan melihat tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi mempunyai timbal balik yang positif terhadap tingkat kesejahteraan suatu negara. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan negara tersebut.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output yang dihasilkan dalam jangka panjang oleh suatu negara. Kebijakan pembangunan ekonomi juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terlihat dari peningkatan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan PDRB juga mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk memungkinkan suatu masyarakat berkembang, karena semakin besar peningkatan nilai PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menggerakkan roda perekonomian untuk memberikan tambahan pendapatan baru bagi masyarakat daerah tersebut. Hal tersebut membuat pendapatan perkapita menjadi indikator yang tepat dalam menilai laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perencanaan pembangunan merupakan alat untuk menentukan pola dan arah pembangunan suatu wilayah. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang membuat setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam merencanakan arah pembangunan daerah tersebut. Hal ini terjadi karena katakteristik dan ketersediaan sumber daya daerah. Maka pemerintah daerah perlu memahami karakteristik suatu daerah agar dapat mengembangkan rencana pembangunan ekonomi daerah yang sesuai. Dengan demikian, penentuan sektor potensial di daerah yang bersangkutan merupakan salah satu strategi dalam merencanakan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah.

Dari pernyataan di atas, sektor potensial merupakan satu-satunya sector yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Oleh karena itu pemerintah daerah dapat menentukan target-target pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan sektor-sektor potensial sebagai acuan yang ingin dicapai oleh daerah tersebut.

Investasi yang memadai diperlukan untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan. Investasi bukanlah satu-satunya indikator pertumbuhan ekonomi, namun dengan adanya investasi sumber daya modal akan bertambah dan dapat merangsang peningkatan hasil produksi (output). Selain itu, investasi akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa sehingga dapat menciptakan sumber pendapatan baru. Investasi dapat menjadi pelumas bagi pembangunan ekonomi daerah untuk mencapai target yang telah

ditentukan. Namun, dana investasi harus dialokasikan dengan sesuai agar dana investasi tersebut digunakan secara efisien.

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Jember berbatasan langsung dengan Kabupaten Bondowoso di sebelah utara. Di sebelah barat, Kabupaten Jember berbatasan langsung dengan Kabupaten Lumajang. Sedangkan di sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuwangi.

Pada tahun 2021 Ekonomi Kabupaten Jember mengalami pertumbuhan sebesar 4,00 persen setelah sebelumnya mengalami kontraksi di tahun 2020 sebesar 2,98 persen. Kemudian meningkat kembali sebesar 4,53 persen pada tahun 2022. Berdasarkan kondisi tersebut, maka kondisi perekonomian Kabupaten Jember perlu ditingkatkan. Memperbaiki iklim investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember sangat diperlukan untuk menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember perlu merumuskan suatu kebijakan pembangunan yang tepat berdasarkan kondisi saat ini. Salah satu strategi yang dapat digunakan Pemerintah Kabupaten Jember yaitu menentukan kebutuhan investasi dari sektor-sektor potensial yang ada di Kabupaten Jember.

Beberapa uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa penelitian tentang potensi ekonomi serta peranannya dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Jember sangat penting untuk dikaji secara lebih terperinci. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh

mengenai sektor potensial dan kebutuhan investasinya dalam penelitian yang berjudul “ANALISIS KEBUTUHAN INVESTASI SEKTOR POTENSIAL DALAM RANGKA MENDORONG TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023-2027”.

Mengetahui potensi ekonomi Kabupaten Jember yang ada, maka perencanaan pembangunan daerah ke depan dapat lebih tepat diarahkan dan menjadi dasar pelaksanaan kebijakan prioritas yang mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi daerah untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Apa saja sektor-sektor yang menjadi sektor potensial di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana kegiatan ekonomi dapat dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember?
3. Seberapa besar kebutuhan investasi sektor potensial dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan meranking sektor-sektor potensial yang terdapat di Kabupaten Jember.
2. Menganalisa kegiatan ekonomi atau sektor yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember.

3. Mengetahui besarnya kebutuhan investasi pada masing-masing sektor potensial yang telah diidentifikasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Memberikan tambahan informasi dan pengetahuan penulis mengenai kebutuhan investasi sektor potensial bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember Pada Tahun 2023-2027.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi masyarakat (investor) untuk mengkaji dan menentukan lokasi yang tepat untuk berinvestasi.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan menentukan kebijakan yang berkaitan dengan sektor potensial dan investasi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

4. Bagi Almamater

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.

1.5 Batasan Masalah

Agar mendapatkan penelitian yang jelas, terarah dan tidak menyimpang dari tujuan utama, maka penelitian ini memerlukan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan data tahun 2017-2021 untuk menentukan kebutuhan investasi tahun 2023-2027.
2. Dalam penelitian ini akan menganalisis sektor yang berada di posisi lima teratas pada hasil pembobotan.
3. Variabel yang digunakan yaitu PDRB, pertumbuhan ekonomi, sektor potensial dan investasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan penulis untuk bahan pertimbangan serta kajian dalam menulis penelitian ini, adapun penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan antara lain:

1. Analisis Kebutuhan Investasi Sektor Potensial di Kabupaten Buleleng (Oleh Ida Ayu Widya Paramahita Devi dan I Gusti Bagus Indrajaya, 2014) Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sektor-sektor yang menjadi sektor potensial di Kabupaten Buleleng dan seberapa besar kebutuhan investasi untuk sektor potensial di Kabupaten Buleleng pada tahun 2013-2017. Kondisi nyata terlihat pada PDRB Kabupaten Buleleng Se-Bali menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Bali terjadi ketimpangan antara Bali Utara (Kabupaten Buleleng) dengan Bali Selatan (Kabupaten Badung dan sekitarnya). Data yang digunakan yaitu PDRB Provinsi Bali dan PDRB Kabupaten Buleleng atas dasar harga konstan 2000. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Location Quotient(LQ) dimana $LQ > 1$ merupakan sektor potensial dan ICOR. Ditemukan hasil bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor potensial di Kabupaten Buleleng yaitu sektor pertanian dengan sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya. Kedua, sector pertambangan dan penggalian dengan

sub sektor penggalian. Terakhir, sektor jasa-jasa dengan sub sector pemerintahan umum, sub sektor swasta subsektor sosial kemasyarakatan dan sub sektor perorangan dan rumah tangga. Sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan sub sektor yang membutuhkan investasi paling besar yaitu sub sektor swasta sebesar Rp. 18.231.131,- meliputi sub-sub sektor sosial kemasyarakatan sebesar Rp. 1.277.151,- sub-sub sektor perorangan dan rumah tangga sebesar Rp. 17.302.034,-.

2. Kebutuhan Investasi Sektor Basis Industri Per Kecamatan Di Kabupaten Gianyar Dalam Rangka One Village One Product (OVOP) (Oleh Komang Agus Triasta Putra dan Luh Putu Aswitari, 2013) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebutuhan investasi sektor industri mana yang merupakan sektor basis dalam menentukan *One Village One Product* dari tahun 2013-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan instansi yang terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah LQ (*Location Quotient*) dan ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Hasil penelitian ini diketahui bahwa di setiap kecamatan pada Kabupaten Gianyar memiliki sektor basis industri sebanyak 1-5 sektor dari 15 jenis sector industri yang ada di Kabupaten Gianyar. Jenis sektor basis yang paling banyak dimiliki di setiap kecamatan pada Kabupaten Gianyar adalah jenis sektor basis kerajinan furniture kayu. Estimasi kebutuhan nilai investasi yang diperlukan dari tahun 2013 sampai tahun 2016 adalah kurang lebih antara

Rp.47.755.780.000 miliar sampai dengan Rp.68.088.251.000 miliar yang tersebar dimasing-masing kecamatan yang ada pada Kabupaten Gianyar.

3. Investment Capital Output Ratio (Icor) Dalam Rangka Proyeksi Kebutuhan Investasi Di Kabupaten Majalengka Tahun 2017-2019 (Oleh L Suparto LM, 2017) Penelitian tersebut memperoleh hasil yaitu pada tahun 2011-2014 nilai ICOR Kabupaten Majalengka menunjukkan sifat positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka. Hal ini memberikan arti bahwa produktifitas akumulasi modal di Kabupaten Majalengka terus mengalami peningkatan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Estimasi kebutuhan investasi pada tahun 2017-2019 di Kabupaten Majalengka mengalami fluktuatif namun tetap menunjukkan tren yang meningkat.
4. Kebutuhan Investasi Sektor Basis Dan Non Basis Dalam Perekonomian Regional Bali (Oleh MADE ANTARA, 2004) Jenis penelitian ini adalah kuantitatif ekonomi makro regional yang berbasis angka-angka. Sedangkan sifat penelitian yaitu verifikatif-kuantitatif, yaitu menggunakan formula-formula ekonomi regional terhadap data makro regional Bali yang bersumber pada dokumen-dokumen atau laporan-laporan yang tersebar di berbagai instansi pemerintah Bali. Analisis data menggunakan tiga metode yaitu: (1) *Location Quotient* (LQ), (2) *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR), dan (3) *Metoda Trend Linear*. Dari hasil analisis dan pembahasan ditemukan hal-hal sebagai berikut:
(1) Dari Sembilan sektor dalam perekonomian Provinsi Bali, hanya

empat sektor teridentifikasi sebagai sektor basis yang ditunjukkan oleh nilai LQ (rata-rata 6 tahun) > 1 , yaitu sektor pertanian (LQ = 1,18), sector perdagangan, hotel dan restoran (LQ = 1,94), sektor pengangkutan dan komunikasi (LQ = 1,69), dan sektor jasa-jasa (LQ = 1,56). Sedangkan lima sektor adalah sektor non basis yang ditunjukkan oleh LQ < 1 , yaitu: sektor pertambangan dan penggalian (LQ = 0,08), sektor industri pengolahan (LQ = 0,33), sektor listrik, gas dan air bersih (LQ = 0,91), sektor bangunan (LQ = 0,75), dan sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan (LQ = 0,94). (2) Berdasarkan ICOR, target pertumbuhan dan nilai tambah bruto (PDRB) sektor-sektor basis sebelum tahun ke-t (Y_{t-1}), maka dapat diperkirakan kebutuhan investasi masing-masing sektor basis dalam perekonomian Provinsi Bali sebagai berikut:

- a. Kebutuhan investasi sektor pertanian periode 2005-2010 berturut-turut Rp 227660,58 juta (2005); Rp 262894,10 juta (2006); Rp 302217,01 juta (2007); Rp 346374,04 juta (2008); Rp 396235,35 juta (2009) dan Rp 452822,84 juta (2010), atau kebutuhan total investasi selama enam tahun Rp 1988203,93 juta atau 1,988 triliun.
- b. Kebutuhan investasi sektor perdagangan, hotel dan restoran periode 2005-2010 berturut-turut Rp 133429,39 juta (2005), Rp 110644,27 juta (2006), Rp 87204,66 juta (2007), Rp 63235,82 juta (2008), Rp 38868,31 (2009) juta, dan Rp 14236,83 juta (2010), atau kebutuhan total investasi selama enam tahun Rp 447619,28 juta atau Rp 447,619 milyar.

c. Kebutuhan investasi sektor pengangkutan dan komunikasi periode 2005-2010 berturut-turut Rp 239636,39 juta (2005), Rp 277659,86 juta (2006), Rp 320010,27 juta (2007), Rp 367486,98 juta (2008), Rp 421022,76 juta (2009), dan Rp 481712,02 juta (2010), atau kebutuhan total investasi selama enam tahun Rp 2107528,29 juta atau Rp 2,108 triliun.

d. Kebutuhan investasi sektor jasa-jasa periode 2005-2010 berturut-turut Rp 337103,91 juta (2005), Rp 392065,64 juta (2006), Rp 454163,76 juta (2007), Rp 524787,43 juta (2008), Rp 605584,36 juta (2009), dan Rp 698519,31 juta (2010), atau total kebutuhan investasi selama enam tahun Rp 3012224,40 juta atau Rp 3,012 triliun.

e. Kebutuhan investasi total empat sektor-sektor basis periode 2005-2010 berturut-turut Rp 937830,27 juta (2005), Rp 1043263,87 juta (2006), Rp 1163595,70 juta (2007), Rp 1301884,27 juta (2008), Rp 1461710,78 juta (2009), dan Rp 1647291,00 juta (2010), atau total kebutuhan investasi selama enam tahun Rp 7555575,90 juta atau Rp 7,6 triliun.

f. Kebutuhan investasi total untuk perekonomian Bali periode 2005-2010 berturut-turut Rp 1645617,28 juta (2005), Rp 1908279,94 juta (2006), Rp 2222927,85 juta (2007), Rp 2605284,29 juta (2008), Rp 3076050,63 juta (2009), dan Rp 3662854,34 juta (2010), atau total kebutuhan investasi selama enam tahun Rp 15121014,33 juta, atau Rp 15,121 triliun.

5. Analisis Kebutuhan Investasi Sektor Potensial Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lamongan Pada Tahun 2020 (Oleh Muhamad Mujib, 2019) ini bertujuan untuk menjawab apa saja sektor ekonomi potensial di Kabupaten Lamongan dan berapa kebutuhan investasinya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Alat analisis yang digunakan yaitu Location Quotient (LQ) dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Analisis LQ digunakan untuk menentukan sektor potensial dan ICOR digunakan untuk menentukan kebutuhan investasi dari setiap sektor. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil secara langsung dari website Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian ini menyimpulkan terdapat delapan sektor unggulan yang ada di Kabupaten Lamongan yaitu (1) sektor pertanian, kehutanan, perikanan, (2) sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (3) sektor konstruksi, (4) sektor informasi dan komunikasi, (5) sektor real estate, (6) sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (7) sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, (8) sektor jasa lainnya. Hasil perhitungan ICOR dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan investasi untuk mendorong pertumbuhan output sebesar 1%. Kebutuhan investasi sektor potensial di Kabupaten Lamongan yaitu (1) sektor pertanian, kehutanan sebesar , perikanan sebesar 575,52 miliar, (2) sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang

sebesar 1,65 miliar, (3) sektor konstruksi sebesar 193,92 miliar, (4) sektor informasi dan komunikasi sebesar 86,80 miliar, (5) sektor real estate sebesar 22,59 miliar, (6) sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 271,68 miliar, (7) sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,97 miliar, (8) sektor jasa lainnya sebesar 30 miliar.

6. Analisis Efisiensi Dan Kebutuhan Investasi Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah (Oleh Murjoko, Kusnandar, Minar Ferichani, 2020)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan kebutuhan investasi serta kebijakan pendukung investasi pada sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data menggunakan analisis Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi investasi sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah tergolong sangat efisien dengan rentang nilai ICOR antara 0,01 – 0,39. Sementara itu, estimasi jumlah kebutuhan investasi untuk proyeksi tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah adalah Rp. 4,86 – 7,64 triliun pada skenario pesimis, Rp. 2,74 – 4,31 triliun pada skenario moderat, dan Rp. 124,65 – 195,88 milyar pada skenario optimis. Sedangkan, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah

daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung masuknya investasi di sektor pertanian secara umum adalah pemberian kemudahan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Ease of Doing Business), dan perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif.

7. Analisis Incremental Capital Output Ratio Sektor Unggulan di Kota Tomohon (Oleh Safitri Ngahu, Agnes L. Ch. P Lopian dan Hanly F. Dj. Siwu, 2021) dibuat bertujuan untuk mengetahui nilai sektor basis yang ada di Kota Tomohon, juga nilai ICOR di setiap sektor basis dari Kota Tomohon agar dapat mengetahui seberapa banyak kebutuhan investasi untuk Kota Tomohon agar mencapai pembangunan dan perkembangan ekonomi yang diharapkan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Alat analisis yang digunakan yaitu Location Question (LQ), dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Analisis LQ digunakan untuk menentukan sektor basis/unggul dan ICOR digunakan untuk menentukan kebutuhan investasi dari setiap sektor. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil secara langsung melalui website Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil Penelitian ini menyimpulkan terdapat 8 sektor basis/unggul di Kota Tomohon yaitu (1) Pertambangan dan Penggalian, (2) Pengadaan Listrik dan Gas, (3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (4) Konstruksi, (5) Real Estate, (6) Jasa Pendidikan, (7) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan (8) Jasa Lainnya. Hasil perhitungan

ICOR dapat digunakan untuk mengukur kebutuhan investasi untuk mendorong pertumbuhan produksi output 1%. Kebutuhan investasi sektor Kota Tomohon yaitu (1) Pertambangan dan Penggalian membutuhkan investasi sebesar 3,590,003.01, (2) Pengadaan Listrik dan Gas membutuhkan investasi sebesar 5,756.67, (3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang membutuhkan investasi sebesar 12,775.94, (4) Konstruksi membutuhkan investasi sebesar 8,964,389.31, (5) Real Estate membutuhkan investasi sebesar 380,473.91, (6) Jasa Pendidikan membutuhkan investasi sebesar 241,566.52, (7) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial membutuhkan investasi sebesar 1,621,110.50 dan (8) Jasa Lainnya membutuhkan investasi sebesar 196,302.34.

8. Estimasi Incremental Capital Output Ratio (Icor) Untuk Perencanaan Investasi Dalam Rangka Pembangunan Sektor Pertanian (Oleh Sri H. Susilowati, Prajogo U. Hadi, Supena Friyatno, Muchjidin Rachmat, Mohamad Maulana, dan Miftahul Azis, 2012) Penelitian ini bertujuan: (1) Mengestimasi nilai ICOR dengan pendekatan Input-Output dari Leontief; (2) Melakukan simulasi kebutuhan investasi pertanian untuk mencapai target laju pertumbuhan PDB Sektor Pertanian periode 2010-2014; dan (3) Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong atau penghambat investasi pertanian. Penelitian menggunakan data Tabel Input-Output (I-O) Tahun 1995, 2000, 2005 dan 2008 bersumber dari BPS dan data survei tahun 2011 di provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Riau dan

Sulawesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Nilai ICOR < 1 , yang berarti investasi pertanian efisien; (2) Nilai ICOR selama 1995-2008 menurun yang berarti investasi pertanian makin efisien; (3) Nilai ICOR menurun jika investasi berlanjut hingga pengolahan hasil dan konsumsi; (4) Untuk mencapai target laju pertumbuhan PDB Sektor Pertanian 3,75 persen pada tahun 2014 diperlukan total nilai investasi sebesar Rp 80,1 triliun; dan (5) Faktor-faktor pendorong investasi antara lain adalah prospek pasar output dan keuntungan usaha yang baik, tersedianya modal yang dapat diakses, dan dukungan kebijakan yang kondusif, sementara faktor-faktor penghambat adalah kebutuhan modal yang sangat besar pada awal investasi, harga output beberapa komoditas yang tidak stabil dan ketersediaan lahan yang makin terbatas. Saran: (1) Promosi investasi pertanian yang mencakup on-farm dan pengolahan hasil; (2) Fasilitasi berupa proses perijinan yang lebih sederhana, cepat dan tidak mahal; (3) Peningkatan anggaran pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pertanian; dan (4) Dukungan kepada petani, pekebun, dan peternak berupa kredit-kredit program seperti KKPE, KKP-NR dan KUPS, dengan persyaratan yang lebih ringan.

9. Analisis Kebutuhan Investasi Sektor Unggulan Di Kabupaten Gowa (Oleh Syarif Kurniawan Rahman, 2019) Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan investasi sektor unggulan di Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan data sekunder time series dengan jumlah sampel sebanyak 5 tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan 2017.

Model yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan alat analisis LQ dan ICOR. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat empat sektor unggulan di Kabupaten Gowa yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengolahan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; serta Informasi dan Komunikasi.

10. Analisis Kebutuhan Investasi Sektor-sektor Ekonomi Unggulan dalam Upaya Peningkatan Kesempatan Kerja di Kota Surakarta (Oleh Tia Astriartie, 2010) Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa Kota Surakarta memiliki tiga sektor unggulan yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, sektor persewaan dan jasa perusahaan. Penelitian ini juga menganalisis kebutuhan investasi dari ketiga sektor tersebut. Kebutuhan investasi untuk sektor perdagangan, Hotel dan restoran sebesar Rp. 108322,8 Juta. Untuk sektor keuangan dan sector persewaan dan jasa keuangan mempunyai kebutuhan investasi sebesar Rp. 33878,75 Juta. Bertambahnya kebutuhan investasi berdampak pada penyerapan tenaga kerja di Kota Surakarta. Pada sektor perdagangan, hotel dan restoran menyerap tenaga kerja sebesar 164636 orang. Sedangkan untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menyerap tenaga kerja sebesar 25.283 orang.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ida Ayu Widya Paramahita Devi dan I Gusti Bagus Indrajaya, 2014	Ditemukan hasil bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor potensial di Kabupaten Buleleng yaitu sektor pertanian dengan sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor	Ruang lingkup penelitian yaitu kebutuhan investasi sektor potensial, alat analisis menggunakan LQ dan ICOR	Lokasi dan tahun penelitian, serta alat analisis yang digunakan. Penulis menambahkan alat analisis Shift

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		tanaman perkebunan, sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya. Kedua, sector pertambangan dan penggalian dengan sub sektor penggalian. Terakhir, sektor jasa-jasa dengan sub sector pemerintahan umum, sub sektor swasta subsektor sosial kemasyarakatan dan sub sektor perorangan dan rumah tangga.		Share dan MRP pada penelitiannya
2.	Komang Agus Triasta Putra dan Luh Putu Aswitari, 2013	Hasil penelitian ini diketahui bahwa di setiap kecamatan pada Kabupaten Gianyar memiliki sektor basis industri sebanyak 1-5 sektor dari 15 jenis sector industri yang ada di Kabupaten Gianyar. 1. Estimasi kebutuhan nilai investasi yang diperlukan dari tahun 2013 sampai tahun 2016 adalah kurang lebih antara Rp.47.755.780.000 miliar sampai dengan Rp.68.088.251.000 miliar yang tersebar dimasing-masing kecamatan yang ada pada Kabupaten Gianyar.	Ruang lingkup penelitian yaitu kebutuhan investasi, alat analisis menggunakan LQ dan ICOR	Sektor yang diteliti oleh peneliti terdahulu lebih spesifik yaitu Sektor Industri, lokasi dan tahun penelitian, serta alat analisis yang digunakan. Penulis menambahkan alat analisis Shift Share dan MRP pada penelitiannya
3.	L Suparto LM, 2017	Pada tahun 2011-2014 nilai ICOR Kabupaten Majalengka menunjukkan sifat positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka. Hal ini memberikan arti bahwa produktifitas akumulasi modal di Kabupaten Majalengka terus mengalami peningkatan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.	Ruang lingkup penelitian yaitu kebutuhan investasi, alat analisis menggunakan ICOR	Lokasi dan tahun penelitian, selain ICOR penulis menggunakan alat analisis LQ, Shift Share, dan MRP
4.	MADE ANTARA, 2004	Dari Sembilan sektor dalam perekonomian Provinsi Bali, hanya empat sektor teridentifikasi sebagai sektor basis yang ditunjukkan oleh nilai LQ.	Alat analisis yang digunakan yaitu LQ dan ICOR	Peneliti terdahulu menggunakan Metoda <i>Trend Linear</i> . Penulis menggunakan Shift Share dan

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Sedangkan lima sektor adalah sektor non basis.		MRP sebagai tambahan.
5.	Muhamad Mujib, 2019	Hasil penelitian ini menyimpulkan terdapat delapan sektor unggulan yang ada di Kabupaten Lamongan yaitu (1) sektor pertanian, kehutanan, perikanan, (2) sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (3) sektor konstruksi, (4) sektor informasi dan komunikasi, (5) sektor real estate, (6) sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (7) sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, (8) sektor jasa lainnya.	Alat analisis yang digunakan yaitu LQ dan ICOR	Penulis menggunakan Shift Share dan MRP sebagai tambahan.
6.	Murjoko, Kusnandar, Minar Ferichani, 2020	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi investasi sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah tergolong sangat efisien dengan rentang nilai ICOR antara 0,01 – 0,39. Sementara itu, estimasi jumlah kebutuhan investasi untuk proyeksi tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah adalah Rp. 4,86 – 7,64 triliun pada skenario pesimis, Rp. 2,74 – 4,31 triliun pada skenario moderat, dan Rp. 124,65 – 195,88 milyar pada skenario optimis.	Alat analisis yang digunakan yaitu ICOR	Sektor yang diteliti oleh peneliti terdahulu lebih spesifik yaitu Sektor Pertanian, lokasi dan tahun penelitian, selain ICOR penulis menggunakan alat analisis LQ, Shift Share, dan MRP
7.	Safitri Ngahu, dkk, 2021	Hasil Penelitian ini menyimpulkan terdapat 8 sektor basis/unggul di Kota Tomohon yaitu (1) Pertambangan dan Penggalian, (2) Pengadaan Listrik dan Gas, (3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,	Alat analisis yang digunakan yaitu LQ dan ICOR	Penulis menggunakan Shift Share dan MRP sebagai tambahan.

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		(4) Konstruksi, (5) Real Estate, (6) Jasa Pendidikan, (7) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan (8) Jasa Lainnya.		
8.	Sri H. Susilowati, dkk, 2012	1) Nilai ICOR < 1, yang berarti investasi pertanian efisien; (2) Nilai ICOR selama 1995-2008 menurun yang berarti investasi pertanian makin efisien; (3) Nilai ICOR menurun jika investasi berlanjut hingga pengolahan hasil dan konsumsi; (4) Untuk mencapai target laju pertumbuhan PDB Sektor Pertanian 3,75 persen pada tahun 2014 diperlukan total nilai investasi sebesar Rp 80,1 triliun	Alat analisis yang digunakan yaitu ICOR	Sektor yang diteliti oleh peneliti terdahulu lebih spesifik yaitu Sektor Pertanian, lokasi dan tahun penelitian, selain ICOR penulis menggunakan alat analisis LQ, Shift Share, dan MRP
9.	Syarif Kurniawan Rahman, 2019	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat empat sektor unggulan di Kabupaten Gowa yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengolahan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; serta Informasi dan Komunikasi.	Alat analisis yang digunakan yaitu LQ dan ICOR	Penulis menggunakan Shift Share dan MRP sebagai tambahan
10.	Tia Astriartie, 2010	Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa Kota Surakarta memiliki tiga sektor unggulan yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, sektor persewaan dan jasa perusahaan. Kebutuhan investasi untuk sektor perdagangan, Hotel dan restoran sebesar Rp. 108322,8 Juta.	Alat analisis yang digunakan yaitu LQ dan ICOR	Peneliti terdahulu menggunakan DLQ dan Trend Linear, serta dampaknya pada peningkatan kesempatan kerja. Sedangkan penulis menggunakan Shift Share dan MRP sebagai tambahan, untuk dampaknya pada pertumbuhan ekonomi

Sumber: Ida Ayu Widya Paramahita Devi dan I Gusti Bagus Indrajaya (2014) <https://www.neliti.com/publications/44500/analisis-kebutuhan-investasi-sektor-potensial-di-kabupaten-buleleng>

- Komang Agus Triasta Putra dan Luh Putu Aswitari (2013) <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1361885>
- L Suparto LM (2017) <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/584311>
- Made Antara (2004) <https://www.neliti.com/publications/44040/kebutuhan-investasi-sektor-basis-dan-non-basis-dalam-perekonomian-regional-bali>
- Muhamad Mujib (2019) <https://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/oje/article/view/180>
- Murjoko, Kusnandar, Minar Ferichani (2020) <https://jurnal.uns.ac.id/agrista/article/view/51061>
- Safitri Ngahu, dkk (2021) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/36681>
- Sri H. Susilowati, dkk (2012) <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/jae/article/view/1730>
- Syarif Kurniawan Rahman (2019) <http://eprints.unm.ac.id/14384/>
- Tia Astriartie (2010) <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/14523>

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Ekonomi Pembangunan

Analisis pembangunan ekonomi atau yang lebih dikenal dengan ekonomi pembangunan merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus membahas masalah pembangunan di negara-negara berkembang. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, dan kemudian mengusulkan pendekatan untuk mengatasi masalah yang muncul sehingga mempercepat pembangunan ekonomi negara-negara berkembang.

Ekonomi pembangunan dapat diartikan sebagai usaha dalam rangka mendorong laju pertumbuhan output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan populasi penduduk dengan cara meningkatkan pendapatan perkapita.

Menurut Adam Smith dalam Suryana (2000: 55) ekonomi pembangunan merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Teori Pembangunan JM Keynes berbeda dengan Adam Smith (Mahyudi, 2004:166) yang hanya

menganggap pembangunan ekonomi dapat dilakukan oleh kelompok kapitalis (pengusaha/ wiraswasta) saja dan juga tidak terlalu ekstrem, seperti teori pembangunan Karl Max yang hanya mementingkan para pekerja. Teori pembangunan campuran JM Keynes yang berusaha menggabungkan kedua paham teori pembangunan antara kapitalisme dan sosialisme, mengajukan peranan pemerintah untuk dapat memajukan perekonomian suatu negara, misalnya di Indonesia melalui APBN, aturan-aturan atau regulasi yang cenderung membela masyarakat atau pengusaha kecil, mekanisme pasar modal dan lain-lain.

Sedangkan Simon Kuznets dalam Jhingan (2000: 57) menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen yaitu, pertama pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang, kedua teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk dan ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang

dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Tokoh ekonomi lainnya Schumpeter dalam Suryana (2000: 5) Pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional. Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun. Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Dalam pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi maupun non ekonomi. Oleh sebab itu, sasaran pembangunan yang minimal ada dan pasti ada menurut Todaro dalam Suryana (2000:6) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, kesehatan, dan lingkungan.
2. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, akan tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional.
3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap perbudakan dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan Negara lain, tetapi dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan.

Secara umum, tujuan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut: Pertama, mengembangkan kesempatan kerja untuk populasi saat ini. Kedua, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah. Ketiga, basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam harus dikembangkan.

Dinyatakan Sukirno (2006:10) bahwa cara mudah untuk membedakan arti pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah dengan ungkapan bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi (economics growth) ditambah perubahan

(change). Artinya, ada tidaknya pembangunan ekonomi suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga diukur dari perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan infrastruktur tersedia dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu pembangunan ekonomi meliputi berbagai aspek perubahan dalam kegiatan ekonomi, maka sampai di mana taraf pembangunan ekonomi yang dicapai suatu negara telah meningkat, tidak mudah diukur hanya secara kuantitatif. Berbagai data perlu dikemukakan untuk menunjukkan prestasi pembangunan yang dicapai suatu negara.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi adalah cara yang digunakan oleh suatu negara untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka yang panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam hal teknologi, perkembangan pendidikan, peningkatan dalam kesehatan, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan.

2.2.2 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Rahardjo Adisasmita (2005) mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi wilayah merupakan sebuah fungsi dari sumber daya alam, sumber daya manusia, investasi, sarana dan prasarana pembangunan, transportasi, komponen industri, teknologi, kegiatan ekonomi wilayah, keuangan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah, dan lingkungan pembangunan.

Menurut Arsyad (2004a:298) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara peningkatan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat setempat. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah harus mampu membuat prediksi tentang semua potensi sumberdaya yang ada, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembanguan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu mengeksplorasi potensi sumber

daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 2009).

Paradigma pembangunan telah mengalami perubahan. Secara tradisional, pembangunan ekonomi diartikan sebagai upaya untuk terus meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Pengertian pembangunan ekonomi tradisional sering disebut sebagai strategi untuk mengubah struktur ekonomi menuju industrialisasi.

Sementara itu, dari sudut pandang pembangunan ekonomi modern, pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses yang mengubah berbagai dimensi. Pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan PDRB, tetapi juga pada aspek lain seperti pengentasan kemiskinan, mempersempit kesenjangan pendapatan antar daerah dan mengurangi jumlah pengangguran.

Beberapa ahli juga berpendapat bahwa pembangunan ekonomi daerah harus mencakup tiga inti: kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, rasa bangga terhadap setiap orang yang tinggal di daerah, dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Definisi di atas menunjukkan bahwa campur tangan negara dalam pembangunan daerah merupakan faktor penentu bagi berjalannya proses pembangunan daerah. Intervensi negara harus diorientasikan sejauh mungkin pada karakteristik khusus daerah. Setiap daerah memiliki karakteristiknya masing-masing, sehingga kebijakan

pemerintah daerah dalam menentukan arah dan strategi pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan secara maksimal dan efisien.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk daerah dengan cara membentuk institusi baru, pengembangan industri alternatif, peningkatan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menciptakan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan mengembangkan bisnis baru. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus mampu secara bersama-sama melaksanakan inisiatif pembangunan daerah. Dengan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah sehingga dapat membangun perekonomian daerah.

2.2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Robert M. Solow lebih menekankan pada rangkaian kegiatan produksi yang dilakukan manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau output. Menurutnya, pertumbuhan penduduk bisa berdampak positif dan negatif, maka kondisi tersebut harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang produktif.

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi

dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2004). Menurut Simon Kuznets dalam Todaro (2004), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Dalam Jhingan (2007:58-65), Kuznets menyebutkan ada enam ciri dalam pertumbuhan ekonomi modern. Pertama, laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita. Kedua, peningkatan produktivitas. Ketiga, laju perubahan struktural yang tinggi. Keempat, urbanisasi. Kelima, ekspansi negara maju. Keenam, arus barang, modal, dan orang antarbangsa. Dari keenam ciri pertumbuhan ekonomi itu dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, secara kuantitatif berkaitan dengan pertumbuhan produk nasional dan pertumbuhan penduduk. Kedua, berkaitan dengan peralihan struktural. Ketiga, berkaitan dengan dunia internasional.

Sedangkan menurut M. Suparmoko (2000) Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam harga pasar. Kelemahan PDRB sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi adalah sifatnya yang global dan tidak

mencerminkan kesejahteraan penduduk. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu liran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat (Susanti, dkk, 2000:23)

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Menurut Sirojuzilam (2008:26) perbedaan pokok antara analisis pertumbuhan perekonomian nasional dan analisis pertumbuhan daerah adalah bahwa yang dititikberatkan dalam analisis tersebut belakangan adalah perpindahan faktor (*factors movement*). Kemungkinan masuk dan keluarnya arus perpindahan tenaga kerja dan modal menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi regional. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat apabila memiliki keuntungan absolute kaya akan sumber daya alam dan memiliki keuntungan komparatif apabila daerah tersebut lebih efisien dari daerah lain dalam melakukan kegiatan produksi dan perdagangan.

Teori pertumbuhan ekonomi daerah menganalisis daerah sebagai sistem ekonomi terbuka yang terhubung dengan daerah lain melalui pertukaran faktor produksi dan bahan baku. Pembangunan dalam suatu wilayah akan mempengaruhi pertumbuhan wilayah lain dalam bentuk permintaan sektor untuk wilayah lain yang akan mendorong pembangunan wilayah tersebut atau suatu pembangunan ekonomi dari wilayah lain akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah serta sebaliknya.

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Adapun macam-macam teori pertumbuhan wilayah adalah sebagai berikut (Tarigan, 2004:47):

1. Teori Ekonomi Klasik, sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi dalam kondisi full employment, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stationer (stationary state). Teori ini membahas tentang kebebasan seluas luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi yang dirasa paling baik dilakukan.
2. Teori Harrod-Domar dalam sistem regional, faktor-faktor produksi atau hasil produksi yang berlebihan dapat diekspor dan yang kurang dapat diimpor. Impor dan tabungan adalah kebocoran–kebocoran dalam menyedot output daerah. Sedangkan ekspor dan investasi dapat membantu dalam menyedot output kapasitas penuh

dari faktor-faktor produksi yang ada di daerah tersebut. Kelebihan tabungan yang tidak terinvestasikan secara lokal dapat disalurkan ke daerah-daerah lain yang tercemin dalam surplus ekspor. Apabila pertumbuhan tenaga kerja melebihi dari apa yang diserap oleh kesempatan kerja lokal maka migrasi neto dapat menyeimbangkannya.

3. Teori pertumbuhan Neo-klasik, teori ini sering disebut dengan teori Solow-Swan yang menyatakan bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu mencampuri pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Suatu daerah akan mengimpor modal jika tingkat pertumbuhan modalnya lebih kecil dari rasio tabungan domestik terhadap modal. Dalam pasar sempurna *marginal productivity of labour* (MPL) adalah fungsi langsung tapi bersifat terbalik dari *marginal productivity of capital* (MPK). Hal ini bisa dilihat dari nilai rasio modal tenaga kerja.

4. Teori Jalur Tepat (*Turnpike*), setiap wilayah perlu melihat sektor atau komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan secara cepat, baik karena potensi alam maupun sektor potensi itu memiliki *competitive advantage* untuk dikembangkan.

2.2.4 Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory)

Dalam Sjafrizal (2008: 87) model basis mula-mula diperkenalkan oleh Douglas C. North Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh keuntungan komparatif yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Bila daerah yang bersangkutan dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang mempunyai keuntungan komparatif sebagai basis untuk ekspor, maka pertumbuhan daerah yang bersangkutan akan ditingkatkan. Harry W. Richardson (1977) dalam Tarigan (2005) menjelaskan secara rinci tentang teori basis ekonomi (*economic base theory*) yang mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut atau berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.

Menurut Richardson dalam buku Adisasmita, analisis basis ekonomi adalah berkenaan dengan identifikasi pendapatan basis. Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu wilayah akan menambah arus pendapatan ke dalam wilayah yang bersangkutan, selanjutnya menambah permintaan terhadap barang dan jasa di dalam wilayah tersebut, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan non basis (Adisasmita 2005:28).

Menurut Hover dalam Soepono pertumbuhan beberapa sektor basis akan menentukan pembangunan daerah secara keseluruhan, sementara berkembangnya sektor nonbasis hanya merupakan

konsekuensi-konsekuensi dari pembangunan daerah (Soepono, 2001:41-53). Dalam teori basis ekonomi menganggap bahwa perekonomian regional dibagi menjadi dua sektor yaitu sektor basis dan sektor nonbasis.

Sektor potensial juga merupakan sektor basis dimana produk dari sektor tersebut tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan di dalam daerah namun juga mampu memenuhi kebutuhan di daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa produk dari sektor tersebut memiliki kemampuan ekspor dan mampu mendatangkan pendapatan dari luar daerah.

Sektor basis merupakan sektor yang melakukan aktifitas berorientasi ekspor keluar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Sektor basis memiliki peran penggerak utama (*primer mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah semakin maju pertumbuhan wilayah. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis menimbulkan efek ganda dalam perekonomian regional. Sedangkan sektor non basis adalah sektor yang menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat di dalam batas wilayah perekonomian bersangkutan

2.2.5 Teori Investasi

Teori investasi digunakan untuk merumuskan tujuan investasi, menyesuaikan profil risiko, dan menghitung perkiraan kinerja investasi seseorang atau organisasi. Selain itu, teori investasi juga dapat digunakan untuk membangun portofolio dan menganalisis kinerja

investasi. Keberadaan teori investasi ini bermula dari pemahaman dasar pengamatan atau pengalaman yang sebelumnya dirasakan oleh para ahli tentang situasi ekonomi, pergerakan yang terkait dengan perilaku masyarakat, dan faktor lainnya. Berinvestasi tidak dapat dilakukan tanpa landasan dasar untuk membangun strategi guna membantu menganalisis pasar dan mengambil keputusan investasi.

Menurut Sumanto (2006), investasi merupakan komitmen sejumlah dana suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai kompensasi unit yang diinvestasikan. Sedangkan Husnan dalam Anoraga dan Pakarti (2006) mendefinisikan investasi sebagai penggunaan uang dengan maksud memperoleh penghasilan. Investasi merupakan penanaman modal di dalam perusahaan, dengan tujuan agar kekayaan suatu korporasi atau perusahaan bertambah. Investasi juga didefinisikan sebagai barang-barang yang dibeli oleh individu ataupun perusahaan untuk menambah persediaan modal mereka (Mankiw, 2000).

Menurut Lypsey (1997), investasi adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi saat ini dimana berdasarkan periode waktunya, investasi terbagi menjadi tiga diantaranya adalah investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Investasi merupakan komitmen sejumlah dana pada suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai unit kompensasi. Unit yang diinvestasikan mencakup waktu

yang digunakan, tingkat inflasi yang diharapkan dan ketidakpastian masa mendatang.

Berdasarkan teori ekonomi investasi berarti pembelian dan produksi dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetap digunakan untuk produksi yang akan datang. Investasi merupakan salah satu komponen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential dan investasi residential.

Penanaman modal atau yang lebih dikenal sebagai investasi merupakan salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian suatu negara atau daerah. Jumlah besaran investasi yang ditanamkan di suatu daerah dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Lebih jelas Harrod-Domar dalam Jhingan (2007:229) memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai dampak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, bahwa investasi dapat menciptakan pendapatan (dampak permintaan). Kedua, dengan investasi dapat memperbesar kapasitas produksi dalam perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal (dampak penawaran). Karena itu, selama investasi netto tetap berlangsung, pendapatan nyata dan output akan senantiasa membesar. Untuk mempertahankan tingkat *equilibrium* pendapatan pada pekerjaan penuh dari tahun ke tahun, baik pendapatan

nyata maupun output, keduanya harus meningkat dalam laju yang sama pada saat kapasitas produksi modal meningkat.

Kebutuhan investasi adalah jumlah estimasi minimum investasi yang dibutuhkan oleh setiap kegiatan atau sektor ekonomi di suatu daerah. Penyusunan perencanaan kebutuhan investasi merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan keseluruhannya. Perencanaan pembangunan, baik secara makro, sektoral maupun regional pada dasarnya ditentukan oleh kemampuan penyediaan sumber dana atau pembiayaan yang akan diinvestasikan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Ditinjau dari sasaran pembangunan yang hendak dicapai, kebutuhan investasi harus memperhitungkan laju pertumbuhan secara agregat dan laju pertumbuhan secara sektoral. Sedangkan ditinjau dari sumbernya, rencana kebutuhan investasi harus pula memperhitungkan kemampuan sumber pembiayaan yang dapat disediakan, baik dari pemerintah maupun swasta serta masyarakat, serta sumber-sumber pelengkap lainnya.

2.2.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah pada suatu kurun waktu tertentu. PDRB juga merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh semua sektor perekonomian suatu daerah dengan cara menerapkan jumlah total barang dan jasa yang diproduksi oleh semua

sektor ekonomi. Nilai PDRB ini akan menjelaskan sejauh mana daerah tersebut mampu memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada. Besaran belanja daerah juga dapat mencerminkan keadaan ekonomi masing-masing daerah secara keseluruhan. Belanja daerah atau pengeluaran pemerintah merupakan salah satu bentuk stimulus yang dilakukan pemerintah terhadap perekonomian daerah. Semakin tinggi total belanja daerah yang dialokasikan untuk pembangunan daerah, semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya. Artinya, kondisi perekonomian di daerah juga akan membaik.

Menurut BPS (2019) PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Secara teoritis yang disebut dengan terjadinya perubahan struktur ekonomi tidak selalu di tandainya dengan besarnya peran suatu sektor dalam perekonomian, tetapi secara riil memang telah terjadi pergeseran kegiatan ekonomi di suatu sektor tertentu yang di tandai dengan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi yang mendukung sektor bersangkutan. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahunnya. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku di gunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomis. Sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertambahan ekonomi dari tahun ke tahun. Pendapatan regional didefinisikan sebagai tingkat pendapatan masyarakat pada suatu wilayah analisis. Tingkat pendapatan regional dapat di ukur dari total pendapatan wilayah ataupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. (Tarigan, 2004)

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian, yaitu:

1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit

produksi tersebut dalam penyajian ini menggunakan Tahun Dasar 2010 dan dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Pengalihan, (3) Industri Pengolahan, (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estat; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan (17) Jasa Lainnya.

2. Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah besaran nilai produk barang dan jasa (output) yang dihasilkan di dalam suatu daerah untuk digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga dan Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR), pemerintah, ditambah dengan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan inventori), serta ekspor neto (merupakan ekspor dikurang impor).

3. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses

produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

2.2.7 Konsep *Location Quotient* (LQ)

Salah satu metode analisis praktis yang digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif suatu sektor, subsector atau suatu komoditas adalah dengan menggunakan *Location Quotient* (LQ) yang pertama kali dikemukakan oleh Robert Murry Haig (1928) dan kemudian banyak digunakan dalam buku-buku tentang analisis ekonomi regional. *Location Quotient* merupakan suatu cara analisis kuantitatif dengan menggunakan data PDRB untuk membandingkan kontribusi nilai tambah sektor ekonomi suatu daerah terhadap sektor ekonomi yang sama pada tingkat provinsi (Alhempy et al., 2014).

Menurut Tarigan (2015) *Location Quotient* (LQ) adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor atau industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor atau industri pada wilayah yang lebih besar. Sjafrizal (2018: 225) teknik ini pada dasarnya sangat sederhana dan tidak memerlukan data yang banyak. Namun, teknik ini mempunyai berbagai kelemahan sehingga perlu didukung oleh analisis fakta empiris lain dalam penggunaannya.

Terdapat tiga jenis data yang dapat digunakan untuk menghitung LQ. *Pertama* adalah nilai tambah (*value-added*) dari masing-masing sektor atau subsektor sebagaimana terdapat dalam buku statistik PDRB menurut lapangan usaha yang umumnya sudah disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) daerah. *Kedua*, adalah nilai produksi barang dan jasa yang dapat dihitung dengan jalan mengalikan data jumlah produksi yang tercatat pada dinas dan instansi pemerintah daerah dengan harga barang dan jasa bersangkutan. *Ketiga*, jumlah orang yang bekerja (*employment*) pada masing-masing sektor, subsector atau pada setiap komoditi bersangkutan (Sjafrizal, 2018).

Analisis LQ sesuai dengan rumusnya memang sangat sederhana dan apabila digunakan dalam bentuk *one shot analysis*, manfaatnya juga tidak begitu besar, yaitu hanya melihat apakah LQ berada di atas 1 atau tidak. Akan tetapi, analisis LQ bisa dibuat menarik apabila dilakukan dalam bentuk *timeseries* atau *trend*, artinya analisis untuk beberapa kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, perkembangan LQ bisa dilihat

untuk sektor tertentu pada kurun waktu yang berbeda, apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Hal ini bisa memancing analisis lebih lanjut, misalnya apabila naik dilihat faktor-faktor yang membuat daerah kita tumbuh lebih cepat dari rata-rata nasional. Demikian pula apabila turun, dikaji faktor-faktor yang membuat daerah kita tumbuh lebih lambat dari rata-rata nasional. Hal ini bisa membantu kita melihat kekuatan atau kelemahan wilayah yang lebih luas. Potensi yang positif digunakan dalam strategi pengembangan wilayah. Adapun faktor-faktor yang membuat potensi sektor di suatu wilayah lemah, perlu dipikirkan apakah perlu penanggulangan atau dianggap tidak prioritas (Tarigan, 2015).

2.2.8 Konsep *Shift Share* (SS)

Analisis *Shift Share* merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis pertumbuhan pergerakan ekonomi pada suatu wilayah. Analisis *Shift Share* merupakan analisis yang dilaksanakan untuk mengetahui adanya perubahan serta pergeseran suatu sektor maupun industri pada perekonomian regional maupun lokal (Safwadi dan Rangkuti dalam Salakory dan Matulesy, 2020). Tujuan dari analisis *Shift Share* adalah untuk menentukan produktivitas perekonomian suatu daerah terhadap daerah yang lebih besar (Anggiasari, 2018).

Menurut Arsyad (2010: 389) analisis *Shift Share* adalah analisis yang bertujuan untuk menentukan kinerja perekonomian daerah. Teknik analisis *Shift Share* membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah, seperti tenaga kerja, nilai tambah, pendapatan atau

output, selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh-pengaruh: pertumbuhan nasional (N), industri mix/bauran industri (M), dan keunggulan kompetitif (C).

Menurut Mahrita dalam Anggiasari (2018), analisis *Shift Share* terbagi menjadi tiga komponen, yaitu: (1) Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), untuk mengetahui pergeseran ekonomi daerah yang dipengaruhi oleh pergeseran ekonomi daerah acuan. (2) Pergeseran proporsional (*proportional shift*), untuk mengukur perubahan pertumbuhan suatu sektor di daerah dibandingkan dengan sektor yang berada di daerah acuan. (3) Pergeseran diferensial (*differential shift*), digunakan untuk mengetahui seberapa jauh daya saing industri daerah dengan perekonomian daerah acuan.

Menurut Kurniawan dalam Anggiasari (2018), analisis *Shift Share* memiliki beberapa kegunaan, yaitu: (1) Untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. (2) Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap suatu sektor ekonomi suatu daerah. (3) Untuk mengetahui komponen yang mempengaruhi perubahan PDRB di daerah yang diteliti. (4) Untuk mengetahui pergeseran ekonomi di daerah yang diteliti sebagai akibat dari perubahan ekonomi wilayah yang diteliti maupun wilayah referensi.

Walaupun sama-sama membandingkan perbedaan laju pertumbuhan dari berbagai sektor ekonomi di suatu daerah dengan

daerah yang lebih besar, analisis *Shift Share* lebih tajam dibandingkan dengan metode LQ. Pada metode LQ tidak memberikan penjelasan faktor perubahan sektor-sektor ekonomi namun metode *Shift Share* memperinci faktor penyebab perubahan dari beberapa sektor ekonomi tersebut.

2.2.9 Konsep Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Model Rasio Pertumbuhan (MRP) adalah membandingkan pertumbuhan suatu kegiatan baik dalam skala yang lebih luas maupun dalam skala yang lebih kecil. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) adalah alat analisis alternatif yang digunakan dalam penentuan deskripsi kegiatan ekonomi perencanaan wilayah dan kota yang diperoleh dari dengan memodifikasi model shift share (Yusuf, 1999). Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) merupakan modifikasi dari model *Shift Share* dimana hasil yang diperoleh dengan metode *Shift Share* adalah hasil angka riil yang terdiri dari kontribusi dan pertumbuhan, sedangkan yang dihasilkan oleh model MRP dalam bentuk angka koefisien.

Model analisis ini diturunkan dari persamaan awal komponen utama dalam analisis *Shift Share* yaitu *Differential Shift* dan *Proportionality Shift*. Analisis Model Rasio Pertumbuhan digunakan pada suatu wilayah untuk analisis deskripsi kegiatan ekonomi potensial yang ditekankan pada analisis struktur ekonomi sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan potensi dari ekonomi wilayah tersebut.

Model Rasio Pertumbuhan memiliki nilai lebih kecil, lebih besar atau sama dengan satu. Alat ini terbagi menjadi dua (Suyana Utama, 2010:63-64) yaitu rasio pertumbuhan wilayah referensi (RPr) dan rasio pertumbuhan wilayah studi (RPs)

2.2.10 Konsep *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR)

Badan Pusat Statistik (2016) dalam perencanaan pembangunan ekonomi, target pertumbuhan ekonomi telah ditentukan. Salah satunya yaitu bersumber dari investasi, maka target pencapaian pertumbuhan ekonomi, diperlukan suatu indikator yang berkaitan dengan investasi. Indikator yang diperlukan yaitu *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) yaitu tambahan output dan tambahan modal. Determinan yang berpengaruh terhadap pembentukan output perekonomian di suatu wilayah adalah stok kapital. Rasio modal-output merupakan konsep penting dan berguna bagi perencanaan ekonomi terutama pada waktu memeriksa konsistensi antara sasaran pertumbuhan pendapatan nasional dengan modal. Dalam rangka memperkirakan keperluan finansial pertumbuhan diperlukan adanya perkiraan mengenai volume investasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran output tertentu (Jhingan, 2018).

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah jumlah modal tambahan (investasi) yang diperlukan untuk meningkatkan atau menambah satu unit output atau produksi. Nilai koefisien ICOR diperoleh dengan membandingkan jumlah tambahan modal dengan

tambahan output. Atau secara sistematis koefisien ICOR dinyatakan sebagai rasio antara penambahan investasi terhadap penambahan output. Sebenarnya penambahan output tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor investasi yang ditanamkan, tetapi juga dipengaruhi oleh variabel lainnya, seperti peningkatan produktivitas dan memanfaatkan sepenuhnya kapasitas produksi. Kemajuan teknologi dan lapangan kerja merupakan faktor lain yang juga memberikan pengaruh pada investasi, namun pada perhitungan ICOR mengasumsikan bahwa faktor-faktor lain tersebut dalam keadaan konstan. Menurut Widodo (Imelda, 2015) nilai ICOR yang menunjukkan produktivitas investasi yang baik adalah antara 3–4. Semakin tinggi ICOR mengidentifikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. Sebaliknya, ICOR yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal.

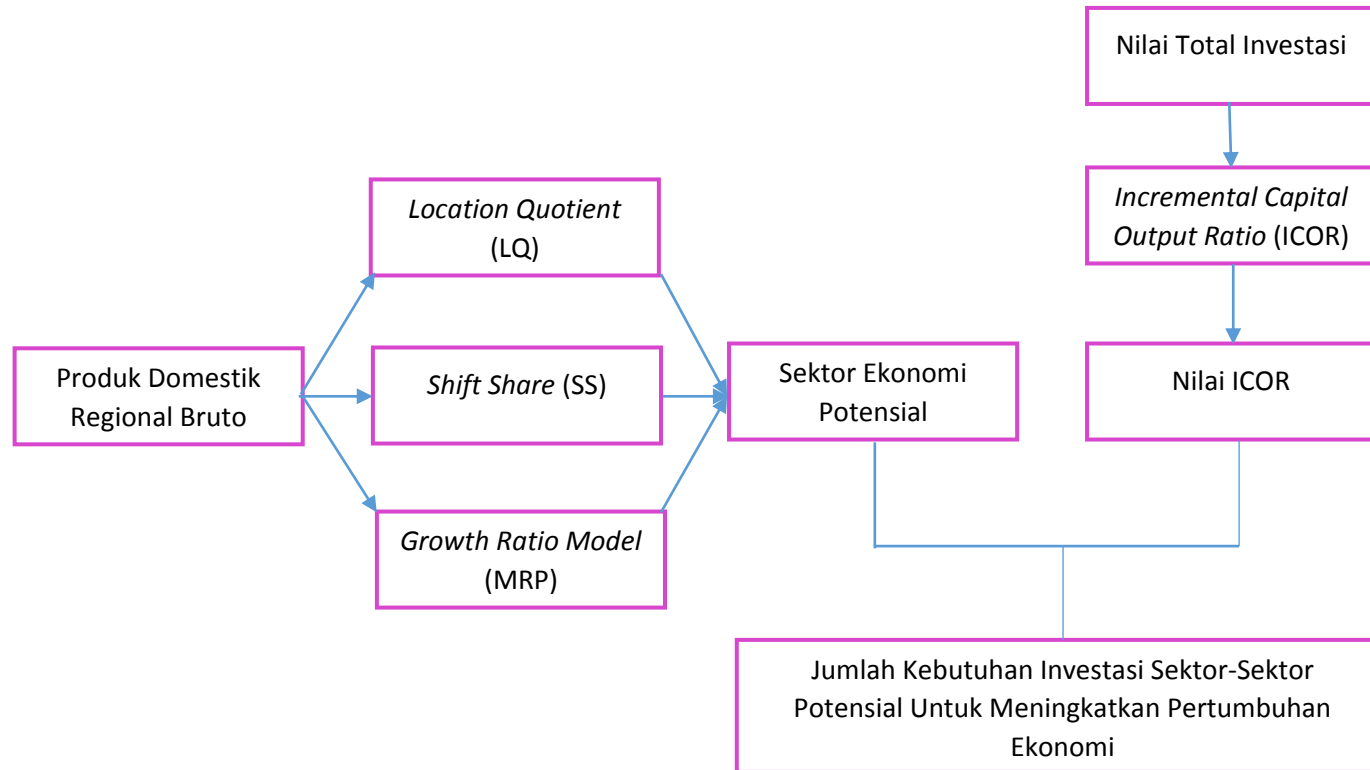
Konsep ICOR pada awalnya dikembangkan oleh Sir Ray Harrod dan Evsey Domar yang lebih dikenal dengan Harrod-Domar, yang intinya menunjukkan adanya hubungan antara peningkatan stok kapasitas produksi dan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output. Harapannya adalah semakin tinggi peningkatan kapasitas produksi semakin tinggi pula output yang dapat dihasilkan. Model Harrod-Domar mengaitkan adanya pengaruh tambahan stok kapital terhadap output yang disebut ICOR. Perhitungan ICOR ini digunakan untuk menentukan seberapa besar kebutuhan investasi pada tingkat

pertumbuhan ekonomi dan dengan ICOR bisa dilihat seberapa besar efisiensi investasi yang ditanamkan di suatu daerah atau di suatu negara pada periode tertentu (Hapsari, 2017)

Dalam penghitungan ICOR, konsep investasi yang digunakan mengacu pada konsep ekonomi nasional. Pengertian investasi yang dimaksud di sini adalah *fixed capital formation* atau pembentukan barang modal tetap yang terdiri dari tanah, gedung atau konstruksi, mesin dan perlengkapannya, kendaraan dan barang modal lainnya. Sementara itu nilai yang diperhitungkan mencakup:

1. Pembelian barang baru atau bekas
2. Pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan pihak lain.
3. Pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan sendiri.
4. Penjualan barang modal bekas *Fixed Capital Formation* atau Pembentukan Barang Modal Tetap dalam hal ini adalah Pembentukan Barang Modal Tetap Bruto (PMTB).

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat / Lokasi & Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat / Lokasi Penelitian

Dalam menunjang keakuratan hasil penelitian kebutuhan investasi sektor-sektor potensial Kabupaten Jember, maka penelitian dilakukan secara langsung di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2023.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, karena penelitian ini banyak berhadapan dengan angka, mulai dari proses perhitungan, metode pengumpulan, dan penyajian hasil disajikan dengan menggunakan angka.

Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian deskriptif karena penelitian ini mampu menggambarkan kondisi perekonomian Kabupaten Jember, hasil dari penelitian akan memberikan informasi tentang apa saja sektor-sektor potensial yang dimiliki Kabupaten Jember dan bagaimana peran sektor tersebut supaya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember.

3.3 Identifikasi Variabel

Penelitian ini menggunakan 4 variabel yaitu Produk Domestik Regional Bruto (X1), Sektor Potensial (X2), Investasi (X3) dan Pertumbuhan Ekonomi (Y).

3.4 Definisi Operasional

3.4.1 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto atau biasanya disingkat PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang berperan dalam membuat perencanaan kebijaksanaan dalam pembangunan, menentukan arah pembangunan serta mengevaluasi hasil pembangunan wilayah tersebut. Perkembangan PDRB terjadi akibat perubahan harga produksi atau indikator produksi. Perubahan ini menyebabkan sumbangan nilai tambah setiap sektor terhadap PDRB juga akan mengalami perubahan. PDRB dibagi dua yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahunnya. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomis. Sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

3.4.2 Sektor Potensial

Sektor potensial adalah sektor yang salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan faktor anugerah (endowment factors). Selanjutnya faktor ini berkembang lebih lanjut melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuan kegiatan ekonomi. Kriteria sektor potensial akan sangat bervariasi. Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah, diantaranya: pertama, sektor unggulan tersebut memiliki laju tumbuh yang tinggi; kedua, sektor tersebut memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar; ketiga, sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik ke depan maupun kebelakang; keempat, dapat juga diartikan sebagai sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi (Sambodo dalam Usya, 2006).

3.4.3 Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Data investasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari jenis PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) di Kabupaten Jember. PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) merupakan pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi.

Dengan menggunakan data PMTB tersebut dapat dihitung estimasi besarnya investasi yang dibutuhkan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai sasaran atau target laju pertumbuhan yang ingin dicapai. Ini berarti bahwa perkiraan jumlah investasi yang diperlukan akan ditentukan oleh laju pertumbuhan dan pembangunan yang hendak dicapai. Dalam hubungan ini disamping perhitungan secara total, kebutuhan investasi itu perlu pula diperinci atau dialokasikan kepada masing-masing sektor.

3.4.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan Peningkatan jumlah output (barang dan jasa) yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi menjadi alat ukur untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu wilayah. Suatu wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dianggap memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi pula. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah mencerminkan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu ketika terjadi pertumbuhan ekonomi selalu diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat daerah tersebut yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah yang bersangkutan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data

sebagai acuan perhitungan. Metode pengumpulan data sekunder sering disebut juga dengan metode penggunaan bahan dokumen. Karena dalam hal ini, peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tapi meneliti dan memanfaatkan data yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain. Peneliti mengambil data secara langsung pada sumber data yaitu situs web otoritas yang bertanggung jawab yaitu BPS Kabupaten Jember dan BPS Provinsi Jawa Timur.

3.6 Metode Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah:

3.6.1 Metode *Location Quotient* (LQ)

Analisis *Location Quotient* di gunakan karena memiliki kebaikan berupa alat analisis yang sederhana yang dapat menunjukkan struktur perekonomian suatu daerah dan industri substitusi impor potensial atau produk yang bisa dikembangkan untuk ekspor dan menunjukkan industri potensial untuk di analisis lebih lanjut. Alat analisis *Location Quotient* dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan komposisi dan pergeseran sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan wilayah (Adisasmita, 2005:29).

Analisis ini digunakan untuk mengetahui komoditas basis pada masing-masing kecamatan di wilayah penelitian. Teknik analisis

yang digunakan adalah *Location Quotient* (LQ), yaitu perbandingan antara besarnya peranan komoditas tersebut secara nasional atau pada wilayah yang lebih luas sehingga diperoleh derajat relatif spesialisasi suatu komoditas. Secara sistematis perhitungan LQ dinyatakan sebagai berikut:

$$LQ = \frac{Si/s}{Ni/n}$$

Keterangan:

LQ : Nilai *Location Quotient* (LQ).

Si : PDRB sektor i di Kabupaten Jember

S : PDRB total di Kabupaten Jember

Ni : PDRB sektor i di Provinsi Jawa Timur

N : PDRB total di Provinsi Jawa Timur

Jika hasil perhitungannya menunjukkan $LQ > 1$, berarti tingkat spesialisasi sektor i di Kabupaten Jember lebih besar di banding sektor yang sama pada Provinsi Jawa Timur berarti merupakan sektor basis, sedangkan $LQ < 1$, berarti tingkat spesialisasi sektor i di Kabupaten Jember lebih kecil di banding sektor yang sama pada Provinsi Jawa Timur berarti bukan sektor basis (sektor lokal/impor). Bila $LQ=1$ berarti tingkat spesialisasi sektor i di Kabupaten Jember sama dengan sektor yang sama pada Provinsi Jawa Timur.

Teknik ini memiliki asumsi bahwa semua penduduk di suatu daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola

permintaan nasional (regional). Bahwa produktivitas tiap pekerja di setiap sektor industri di daerah adalah sama dengan produktivitas pekerja dalam industri nasional. Setiap industri menghasilkan barang yang homogen pada setiap sektor, dan bahwa perekonomian bangsa yang bersangkutan adalah suatu perekonomian tertutup (Kartikaningdyah, 2013).

3.6.2 Metode *Shift Share* (SS)

Analisis ini menggambarkan kinerja sektor-sektor di suatu wilayah di bandingkan dengan kinerja perekonomian nasional atau regional. Tujuan dalam analisis yaitu untuk menentukan kinerja atau produktivitas perekonomian suatu daerah dengan daerah yang lebih luas untuk menjadi acuan. Misalkan dengan membandingkan Kabupaten Jember dengan Provinsi Timur.

Analisis *Shift Share* adalah salah satu teknik kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap struktur wilayah administratif. Pengaruh pertumbuhan provinsi disebut pengaruh pangsa (*Share*), pengaruh bauran industri disebut proporsional *shift* atau mengukur perubahan relatif, dan pengaruh keunggulan kompetitif disebut *differential shift* dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri lokal dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Itulah sebabnya disebut teknik *Shift Share* (Widodo, 2006).

Teknik analisis *Shift Share* membagi pertumbuhan sebagai perubahan suatu variabel wilayah (D), seperti pendapatan atau output

selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh daerah acuan (N), pengaruh industri bauran atau *industry mix* (M) dan pengaruh keunggulan kompetitif atau komponen pergeseran differensial (C). Secara sistematis untuk menganalisis sektor i di wilayah j dirumuskan sebagai berikut:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Dimana:

D_{ij} = perubahan variabel PDRB wilayah referensi sektor i di wilayah studi j.

N_{ij} = pertumbuhan wilayah referensi sektor i di wilayah studi j ($E_{ij} \cdot r_n$).

M_{ij} = bauran industri wilayah referensi sektor i di wilayah studi j ($E_{ij} \cdot (r_{in} - r_n)$).

C_{ij} = keunggulan wilayah referensi sektor i di wilayah studi j ($E_{ij} \cdot (r_{ij} - r_{in})$).

Persamaan r_{ij} mewakili laju pertumbuhan pada sektor sektor i di wilayah studi, r_{in} mewakili laju pertumbuhan pada sektor sektor i di wilayah referensi, r_n adalah pertumbuhan ekonomi wilayah referensi, yang kemudian dapat dikemukakan sebagai berikut:

$$r_{ij} = (E_{ij}^* - E_{ij})/E_{ij}$$

$$r_{in} = (E_{in}^* - E_{in})/E_{in}$$

$$r_n = (E_n^* - E_n)/E_n$$

Dimana:

E_{ij} = nilai tambah sektor i di wilayah studi j

E_{in} = nilai tambah sektor sektor i di wilayah referensi

E_n = pertumbuhan ekonomi wilayah referensi

Seluruh variabel diukur pada suatu tahun dasar dan tanda superscript (*) menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada tahun akhir yang dianalisis. Untuk suatu wilayah, pertumbuhan nasional atau provinsi, bauran industri dan keunggulan kompetitif dapat ditentukan bagi suatu sektor atau dijumlah untuk semua sektor sebagai keseluruhan wilayah. Persamaan *Shift Share* untuk sektor tertentu di wilayah tertentu (wilayah j) adalah:

$$D_{ij} = E_{ij} (r_n) + E_{ij} (r_{in} - r_n) + E_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

3.6.3 Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) adalah alat analisis alternatif yang digunakan dalam penentuan deskripsi kegiatan ekonomi perencanaan wilayah dan kota yang diperoleh dari dengan memodifikasi model shift share (Yusuf, 1999). Model Rasio Pertumbuhan merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui perbandingan pertumbuhan pendapatan suatu sektor di wilayah yang lebih kecil dengan wilayah yang lebih besar. Model analisis ini diturunkan dari persamaan awal komponen utama dalam analisis *Shift Share* yaitu Differential Shift dan Proportionality Shift. Analisis Model Rasio Pertumbuhan digunakan pada wilayah

Kabupaten Jember untuk analisis deskripsi kegiatan ekonomi potensial yang ditekankan pada analisis struktur ekonomi sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan potensi dari ekonomi wilayah Kabupaten Jember.

MRP yaitu suatu alat yang dipakai untuk membandingkan pertumbuhan pendapatan suatu sektor di wilayah yang lebih kecil dengan wilayah yang lebih besar. Model Rasio Pertumbuhan memiliki nilai lebih kecil, lebih besar atau sama dengan satu. Alat ini terbagi menjadi dua (Suyana Utama, 2010:63-64) yaitu:

1. Rasio pertumbuhan wilayah referensi (RPr)

Perbandingan antara laju pertumbuhan pendapatan sektor i di wilayah referensi dengan laju pertumbuhan total kegiatan (PDRB) di wilayah referensi.

$$RPr = \frac{\Delta Y_{in}/Y_{in(t)}}{\Delta Y_n/Y_n(t)}$$

Dimana:

ΔY_{in} : Perubahan PDRB sector i di wilayah referensi (Provinsi Jawa Timur)

$Y_{in(t)}$: PDRB sector i di wilayah referensi pada awal penelitian (Provinsi Jawa Timur)

ΔY_n : Perubahan PDRB di wilayah referensi (Provinsi Jawa Timur)

$Y_n(t)$: PDRB di wilayah referensi pada awal penelitian (Provinsi Jawa Timur)

RPr : Perbandingan antara laju pertumbuhan pendapatan sector ke-i di wilayah referensi dengan laju pertumbuhan pendapatan total (PDRB) kegiatan i di wilayah refensi (Provinsi Jawa Timur)

2. Rasio pertumbuhan wilayah studi (Rps)

Perbandingan antara laju pertumbuhan pendapatan sektor i di wilayah studi dengan laju pertumbuhan pendapatan sektor i di wilayah referensi.

$$RPs = \frac{\Delta Y_{ij}/Y_{ij(t)}}{\Delta Y_{in}/Y_{in(t)}}$$

Dimana:

ΔY_{ij} : Perubahan PDRB sector i di wilayah studi (Kabupaten Jember)

$Y_{ij(t)}$: PDRB sektor i di wilayah studi pada awal penelitian (Kabupaten Jember)

ΔY_{in} : Perubahan PDRB di wilayah referensi (Provinsi Jawa Timur)

$Y_{in(t)}$: PDRB sektor i di wilayah referensi pada awal periode (Provinsi Jawa Timur)

RPs : Perbandingan antara laju pertumbuhan pendapatan sektor ke-i di wilayah studi dengan laju pertumbuhan perkembangan total PDRB di wilayah referensi.

Menurut Yusuf (1999: 223-225) kombinasi hasil RPr dan RPs bisa menggambarkan kegiatan ekonomi unggulan dengan empat klasifikasi:

- 1) Nilai RPr (+) dan RPs (+) berarti kegiatan tersebut baik pada wilayah referensi maupun pada wilayah studi dan mempunyai pertumbuhan menonjol.
- 2) Nilai RPr (+) dan RPs (-) berarti kegiatan tersebut pada wilayah referensi pertumbuhannya menonjol akan tetapi pada wilayah studi pertumbuhannya belum menonjol.
- 3) Nilai RPr (-) dan RPs (+) berarti kegiatan tersebut pada wilayah referensi pertumbuhannya tidak menonjol akan tetapi pada wilayah studi pertumbuhannya menonjol.
- 4) Klasifikasi 4, adalah bila RPr (-) dan RPs (-) berarti kegiatan tersebut baik pada wilayah referensi maupun wilayah studi pertumbuhannya tidak menonjol.

3.6.4 Metode Analisis Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Teknik analisis *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) dikembangkan oleh tokoh ekonomi yaitu Sir Ray Harrod dan Evsey Domar. Inti dari konsep ICOR yaitu setiap peningkatan stok kapital (investasi) akan memberikan tambahan output yang lebih banyak. Kombinasi antara penambahan stok kapital (investasi) dan kemampuan tenaga kerja dalam kegiatan produksi mampu memberikan tingkat produktifitas yang lebih tinggi.

Perhitungan nilai ICOR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y}$$

Dimana:

I = Nilai investasi

ΔY = Pertambahan output

Koefisien ICOR digunakan untuk mengetahui perbandingan antara investasi yang dilakukan dan output yang dihasilkan. Koefisien ICOR juga mampu menjelaskan seberapa efisien suatu kegiatan produksi dalam menghasilkan output. Semakin tinggi nilai ICOR mencerminkan bahwa kegiatan produksi tersebut tidak efisien

Metode ICOR juga dapat digunakan dalam menentukan jumlah kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Perhitungan kebutuhan investasi dapat dihitung dengan formula:

$$\Delta K = ICOR \times gt \times Y_{t-1}$$

Dimana:

ΔK = Penambahan stok kapital yang diperlukan

ICOR= Koefisien ICOR

gt = Target pertumbuhan

Y_{t-1} = Output sektor i pada tahun t-1

3.6.5 Penentuan Bobot Penilaian Sektor Potensial

Untuk melihat dan mengidentifikasi sektor potensial yang ada di Kabupaten Jember telah dilakukan berbagai macam penggunaan alat analisis. Karena penggunaan alat analisis lebih dari satu, maka hasil dari setiap analisis yang dilakukan dengan alat analisis LQ, Shift Share, dan MRP diberi bobot evaluasi yang menentukan skor nilai atau peringkat yang ditetapkan untuk masing-masing sektor.

Pengklasifikasian masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Jember dilakukan dengan memberikan nomor yang sesuai dengan jumlah 17 (tujuh belas) sektor ekonomi. Kemudian diberikan nilai dari 1 (satu) sampai dengan 17 (tujuh belas) sesuai dengan nilai masing-masing sektor.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Jember merupakan sebuah wilayah kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember berada di lereng Pegunungan Yang dan Gunung Argopuro membentang ke arah selatan sampai dengan Samudera Indonesia. Dalam konteks regional, Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

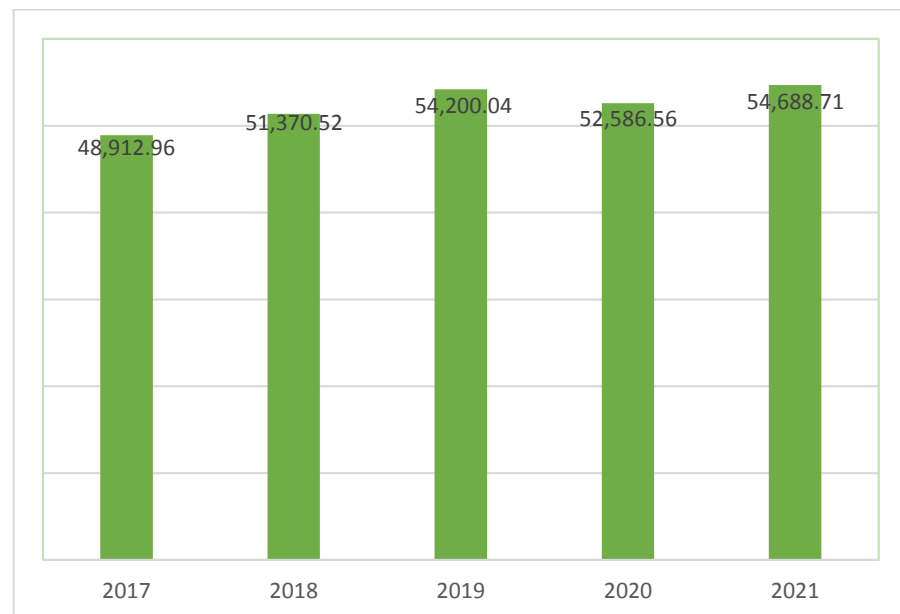
Secara geografis Kabupaten Jember berada pada posisi 7059'6" sampai 8033'56" Lintang Selatan dan 113016'28" sampai 114003'42" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Jember mencakup area seluas 3.293,34 Km², dengan karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan dan dikelilingi pegunungan yang memanjang batas barat dan timur. Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 226 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan. Wilayah Kabupaten Jember juga meliputi Kepulauan Nusa Barung, yang berada di Selatan Laut Jawa. Kabupaten Jember berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten

Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang.

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian

1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto atau biasanya disingkat PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang berperan dalam membuat perencanaan kebijaksanaan dalam pembangunan, menentukan arah pembangunan serta mengevaluasi hasil pembangunan wilayah tersebut. Perkembangan PDRB terjadi akibat perubahan harga produksi atau indikator produksi. Perubahan ini menyebabkan sumbangan nilai tambah setiap sektor terhadap PDRB juga akan mengalami perubahan. PDRB dibagi dua yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahunnya. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomis. Sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.



Sumber: BPS Kabupaten Jember

Gambar 4.1 PDRB Kabupaten Jember Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (miliar rupiah)

Gambar 4.1 memperlihatkan kondisi perekonomian Kabupaten Jember dari Tahun 2017- 2021. Pada tahun 2017-2019 dilihat dari nilai PDRB terus mengalami peningkatan dan menunjukkan tren positif, sedangkan dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan dari total nilai PDRB 2019 Rp 54.200,04 miliar menjadi Rp 52.586,56 miliar di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Kemudian mengalami peningkatan di tahun 2021 dengan jumlah Rp 54.688,71 miliar. Dalam kondisi ini dari tahun 2017-2021 perekonomian di Kabupaten Jember memperlihatkan kondisi yang semakin meningkat. Sumbangsih output terbesar terhadap PDRB Kabupaten Jember disumbang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pada tahun 2017 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang nilai output sebesar 29,09% terhadap nilai total PDRB disusul dengan sector Perdagangan Besar

dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,22%. Dari data statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua sektor masih mendominasi perekonomian Kabupaten Jember dan membuktikan bahwa kedua sektor tersebut mempunyai peran penting dalam memberikan tambahan pendapatan dan lapangan usaha bagi masyarakat Kabupaten Jember.

2. Sektor Potensial

Sektor potensial adalah sektor yang salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan faktor anugerah (endowment factors). Selanjutnya faktor ini berkembang lebih lanjut melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuan kegiatan ekonomi. Kriteria sektor potensial akan sangat bervariasi. Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah, diantaranya: pertama, sektor unggulan tersebut memiliki laju tumbuh yang tinggi; kedua, sektor tersebut memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar; ketiga, sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik ke depan maupun kebelakang; keempat, dapat juga diartikan sebagai sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi (Sambodo dalam Usya, 2006).

Sektor potensial juga merupakan sektor basis dimana produk dari sektor tersebut tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan di dalam daerah namun juga mampu memenuhi kebutuhan di daerah lain. Hal ini

menunjukkan bahwa produk dari sektor tersebut memiliki kemampuan ekspor dan mampu mendatangkan pendapatan dari luar daerah.

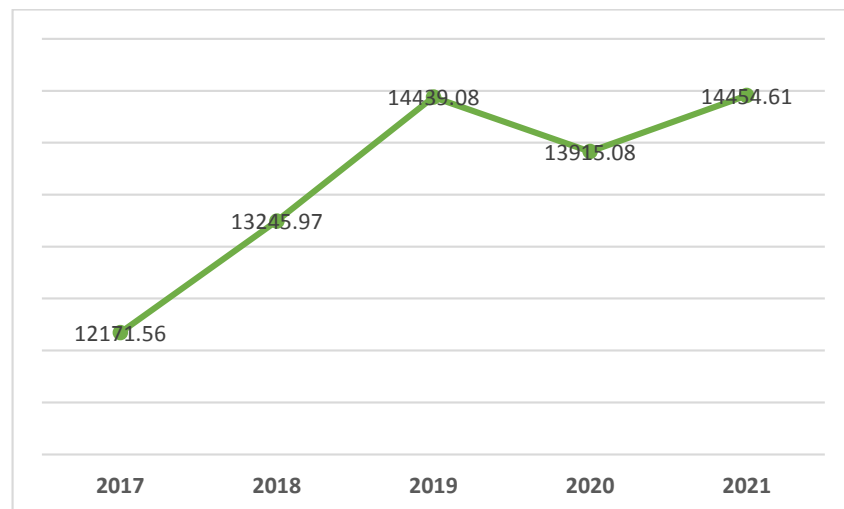
Selain mampu menghasilkan tambahan pendapatan dan sumber pertumbuhan dari wilayah lain, sektor ekonomi potensial juga mampu menggerakkan dan merangsang pertumbuhan sektor lain (sektor ekonomi non potensial). Sektor ekonomi potensial memiliki keterkaitan dengan sektor lain dimana sektor potensial mampu memberikan dampak pengganda terhadap sektor lain. Setiap pertumbuhan yang dihasilkan oleh sektor potensial akan diikuti dengan pertumbuhan di sektor lain. Hal menunjukkan bahwa sektor potensial merupakan *leader sector* yang mampu memberikan sumber pertumbuhan dari dalam maupun luar daerah.

Terdapat tujuh belas sektor yang berpotensi sebagai *leading sector* di Kabupaten Jember diantaranya, yaitu 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2) Pertambangan dan Penggalian, 3) Industri Pengolahan, 4) Pengadaan Listrik dan Gas, 5) Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, 6) Konstruksi, 7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8) Transportasi dan Pergudangan, 9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10) Informasi dan Komunikasi, 11) Jasa Keuangan dan Asuransi, 12) Real Estat, 13) Jasa Perusahaan, 14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, 16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan 17) Jasa Lainnya.

3. Investasi

Investasi adalah pengeluaran yang dikeluarkan yang dikorbankan untuk membeli barang saat ini dengan harapan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang. Investasi dilakukan dalam rangka untuk menghasilkan output yang lebih besar di masa mendatang. Investasi adalah selisih antara ekuitas tahun berjalan (saat ini) dikurangi ekuitas tahun sebelumnya. Penambahan modal (investasi) dapat berupa input produksi yang digunakan dalam suatu kegiatan produksi untuk meningkatkan jumlah output atau produk. Investasi merupakan instrument penting untuk keberlangsungan kegiatan produksi. Investasi menjadi input produksi yang mampu mendorong meningkatnya kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan.

Investasi atau peningkatan modal ditunjukkan pada formulir jumlah penyertaan modal dalam aktiva tetap atau yang biasa disebut dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Kegiatan PMTB adalah pembelian peralatan modal baru, perbaikan peralatan modal yang lama, dan perawatan peralatan modal untuk memanjangkan usia barang tersebut. Peralatan modal sendiri bisa dimanifestasikan seperti alat atau mesin produksi.



Sumber: BPS Kabupaten Jember

Gambar 4.2 Jumlah Nilai Investasi Kabupaten Jember (miliar rupiah)

Gambar 4.2 memperlihatkan jumlah investasi Kabupaten Jember pada tahun 2017 sebanyak Rp 12.171,56 miliar, kemudian mengalami peningkatan 2 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2018 dan 2019 yaitu masing-masing sebesar Rp 13.245,97 miliar dan Rp 14.439,08 miliar. Namun pada tahun 2020 jumlah investasi di Kabupaten Jember mengalami penurunan menjadi Rp 13.915,08 miliar dan kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun berikutnya menjadi Rp 14.454,61 miliar. Jika dilihat secara keseluruhan jumlah investasi Kabupaten Jember menunjukkan tren positif, yang artinya jumlah investasi dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami kenaikan dari Rp 12.171,56 miliar menjadi Rp 14.454,61 miliar.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan Peningkatan jumlah output (barang dan jasa) yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi menjadi alat ukur untuk

mengetahui tingkat kemakmuran suatu wilayah. Suatu wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dianggap memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi pula. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah mencerminkan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu ketika terjadi pertumbuhan ekonomi selalu diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat daerah tersebut yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah yang bersangkutan.



Sumber: BPS Kabupaten Jember

Gambar 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2017-2021 (persen)

Gambar tabel 4.3 memperlihatkan tren negatif dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember. Pada tahun 2017, angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember mencapai 5,11 persen kemudian melambat pada angka 5,02 persen pada tahun 2018. Satu tahun berikutnya pada tahun 2019 tumbuh lebih cepat pada angka 5,51 persen kemudian kembali mengalami perlambatan pada tahun 2020 yaitu berada pada

pertumbuhan sebesar -2,98 persen dan tumbuh kembali menjadi 4,00 persen pada tahun 2021. Situasi pandemic covid-19 turut andil pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember di tahun 2020.

Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember mencapai 3,33 persen. Hampir semua kategori ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Kategori yang mempunyai rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat pada sektor Informasi dan Komunikasi dengan angka 8,58 persen, diikuti dengan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,11 persen diikuti sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,81 persen kemudian diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Transportasi dan Pergudangan dengan masing-masing sebesar 5,30 persen dan 5.01 persen.

Tabel 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.08	0.02	1.46	-1.07	-0.11	0.48
Pertambangan dan Penggalian	5.69	5.67	0.92	-6.61	1.15	1.36
Industri Pengolahan	5.71	6.04	7.06	-6.77	8.08	4.02
Pengadaan Listrik dan Gas	4.76	4.90	5.18	0.53	2.30	3.53
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.49	6.32	6.40	4.07	7.28	6.11
Konstruksi	7.59	7.72	8.93	-6.74	2.11	3.92
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.75	8.38	7.78	-5.67	8.28	5.30

Transportasi dan Pergudangan	7.41	7.52	8.58	-6.05	7.60	5.01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.02	9.03	9.89	-13.26	3.04	3.54
Informasi dan Komunikasi	7.72	8.13	9.33	10.02	7.72	8.58
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.23	5.51	4.53	-0.12	1.39	3.11
Real Estat	5.39	6.48	6.66	2.53	1.94	4.60
Jasa Perusahaan	6.59	7.23	7.41	-4.78	2.15	3.72
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.70	6.88	3.08	-2.22	0.06	2.10
Jasa Pendidikan	5.46	6.23	6.83	2.50	1.49	4.50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.81	7.13	7.67	9.29	-1.83	5.81
Jasa lainnya	4.17	5.75	5.88	-14.15	4.14	1.16
PDRB	5.11	5.02	5.51	-2.98	4.00	3.33

Sumber: BPS Kabupaten Jember

Sedangkan sektor lainnya yang tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan di bawah lima persen adalah sektor Real Estat sebesar 4,60 persen, sektor Jasa Pendidikan sebesar 4,50 persen, sektor Industri Pengolahan sebesar 4,02 persen, sektor Konstruksi sebesar 3,92 persen, sektor Jasa Perusahaan sebesar 3,72 persen, sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 3,53 persen, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 3,54 persen, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,11 persen, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,10 persen, sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,36 persen dan sektor Jasa lainnya sebesar 1,16 persen. Sementara sektor yang tumbuh rata-rata di bawah 1 persen adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,48 persen.

4.2 Analisis Hasil Penelitian

4.2.1 Kontribusi Sektor Ekonomi

Untuk mengetahui kondisi ekonomi Kabupaten Jember dapat diketahui dengan melihat struktur komponen penyusun PDRB melalui kontribusi dari setiap sektor ekonomi yang terdapat di Kabupaten Jember. Kontribusi sektor dihitung dengan membagi PDRB per sektor dengan total PDRB. Hasil perhitungan kontribusi sektor ekonomi terhadap total PDRB di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Jember Tahun 2017-2021

Sektor	Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap PDRB					Rata-rata
	2017	2018	2019	2020	2021	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29.09%	27.49%	26.93%	26.91%	26.01%	27.29%
Pertambangan dan Penggalian	4.43%	4.45%	4.27%	4.14%	4.07%	4.27%
Industri Pengolahan	19.93%	20.11%	20.47%	19.87%	21.13%	20.30%
Pengadaan Listrik dan Gas	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%
Konstruksi	7.83%	8.12%	8.32%	7.93%	7.74%	7.99%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.22%	13.87%	14.20%	13.78%	14.26%	13.87%
Transportasi dan Pergudangan	1.72%	1.78%	1.83%	1.75%	1.78%	1.77%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.33%	2.43%	2.54%	2.28%	2.28%	2.37%
Informasi dan Komunikasi	6.16%	6.23%	6.44%	7.22%	7.32%	6.67%
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.37%	2.40%	2.37%	2.41%	2.36%	2.38%
Real Estat	1.38%	1.39%	1.39%	1.47%	1.41%	1.41%
Jasa Perusahaan	0.35%	0.36%	0.38%	0.37%	0.36%	0.36%

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.47%	3.56%	3.54%	3.65%	3.40%	3.52%
Jasa Pendidikan	5.76%	5.79%	5.84%	6.19%	5.90%	5.90%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.76%	0.79%	0.82%	0.92%	0.87%	0.83%
Jasa lainnya	1.08%	1.09%	1.10%	0.97%	0.98%	1.04%

Sumber: BPS Kabupaten Jember

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa ada tiga sektor ekonomi yang memberikan rata-rata kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Jember. Ketiga sektor tersebut yaitu (1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (2) Sektor Industri Pengolahan, dan (3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 27.29 persen 20.30 persen dan 13.87 persen.

4.2.2 Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis LQ digunakan untuk mengetahui kontribusi suatu daerah sebagai supplier atau importer atas suatu aktivitas atau sektor ekonomi di daerah tersebut (Schaffer, 2010). Salah satu aspek dari analisis LQ adalah sebagai salah satu indikator untuk menentukan sektor unggulan (Basuki & Mujiraharjo, 2017), mengukur konsentrasi relatif kegiatan ekonomi dalam penetapan sektor unggulan sebagai leading sektor suatu kegiatan ekonomi (R. Jumiyanti, 2018).

Perhitungan LQ dilakukan dengan metode perbandingan yaitu membandingkan kondisi perekonomian suatu daerah yang kecil dengan daerah yang lebih besar. Sektor ekonomi dengan nilai perbandingan yang lebih tinggi mencerminkan bahwa sektor tersebut mempunyai keuntungan

komparatif yang lebih besar dibandingkan dengan sektor yang sama dalam skala yang lebih luas. Sektor-sektor yang memiliki keunggulan dalam hal permintaan dan penawaran membuat sektor tersebut mempunyai spesialisasi, sehingga produksi sektor-sektor tersebut dapat diekspor ke luar daerah.

Ada 3 kriteria yang dihasilkan oleh perhitungan LQ. Kriteria pertama yaitu apabila nilai LQ lebih dari satu ($LQ > 1$) maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor potensial dimana sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan dalam dan luar daerah serta mengindikasikan dilakukannya ekspor produk karena adanya surplus. Kriteria kedua yaitu jika nilai LQ sama dengan satu ($LQ = 1$) maka sektor tersebut termasuk dalam kategori sektor non potensial yang mencerminkan bahwa sektor tersebut tidak mampu memenuhi permintaan dari luar daerah karena hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam daerah. Kriteria ketiga yaitu apabila nilai LQ kurang dari 1 ($LQ < 1$) maka sektor tersebut tergolong dalam sektor non potensial, mengindikasikan bahwa sektor tersebut perlu melakukan impor dari daerah lain karena sektor tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri.

Dalam penelitian ini, analisis *Location Quotient* (LQ) menggunakan dua jenis data yaitu PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan (AHDK) 2010 dan PDRB Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan (AHDK) 2010. Jenis data yang digunakan yaitu PDRB menurut lapangan usaha tahun 2017-2021.

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan nilai LQ Kabupaten Jember

Sektor	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Nilai LQ
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.51	2.57	2.58	2.54	2.48	2.54
Pertambangan dan Penggalian	0.91	0.95	0.94	0.92	0.97	0.94
Industri Pengolahan	0.72	0.71	0.71	0.68	0.71	0.71
Pengadaan Listrik dan Gas	0.18	0.19	0.20	0.20	0.20	0.19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.66	0.67	0.68	0.68	0.69	0.68
Konstruksi	0.76	0.77	0.79	0.77	0.76	0.77
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.70	0.72	0.73	0.74	0.74	0.73
Transportasi dan Pergudangan	0.53	0.54	0.56	0.59	0.62	0.57
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.42	0.43	0.43	0.42	0.41	0.42
Informasi dan Komunikasi	1.28	1.30	1.33	1.34	1.34	1.32
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.86	0.87	0.88	0.88	0.87	0.87
Real Estat	0.83	0.84	0.84	0.84	0.83	0.84
Jasa Perusahaan	0.42	0.43	0.43	0.44	0.44	0.43
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.59	1.64	1.63	1.61	1.60	1.61
Jasa Pendidikan	1.99	2.02	2.01	1.99	1.99	2.00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.16	1.16	1.16	1.17	1.09	1.15
Jasa lainnya	0.82	0.83	0.83	0.83	0.81	0.82

Sumber: Lampiran 1 dan Lampiran 2 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.3 hasil perhitungan LQ di Kabupaten Jember pada tahun 2017-2021, diperoleh hasil bahwa terdapat lima sektor yang tergolong sebagai sektor potensial (nilai LQ lebih dari satu) di Kabupaten Jember. Lima sektor tersebut yaitu (1) Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan, (2) Sektor Informasi dan Komunikasi, (3) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (4) Jasa Pendidikan, dan (5) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Selanjutnya dua belas sektor lainnya tergolong dalam sektor non potensial (nilai LQ kurang dari satu) yaitu (1) Sektor Pertambangan dan

Penggalian, (2) Sektor Industri Pengolahan, (3) Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, (4) Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (5) Sektor Konstruksi, (6) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (7) Sektor Transportasi dan Pergudangan, (8) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (9) Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, (10) Sektor Real Estat, (11) Sektor Jasa Perusahaan, (12) Sektor Jasa lainnya. Sektor-sektor tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Jember karena memiliki nilai spesialisasi yang rendah sehingga masih memerlukan impor dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan dari sektor-sektor tersebut.

4.2.3 Analisis *Shift Share* (SS)

Analisis *Shift Share* bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas suatu daerah dengan daerah atasnya yang menjadi acuan. Untuk memberikan gambaran sektor-sektor apa saja yang berkembang dalam meningkatkan potensi perekonomian Kabupaten Jember menggunakan alat analisis *Shift Share*. Dengan cara membandingkan perkembangan ekonomi masing-masing sektor yang ada di Kabupaten Jember dengan sektor-sektor yang ada Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui hasil analisis *Shift Share* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.4 Hasil Perhitungan *Shift Share* Kabupaten Jember 2017-2021
(miliar rupiah)**

Sektor	$N_{ij} = E_{ij} * r_n$	$M_{ij} = E_{ij} * (r_{in} - r_n)$	$C_{ij} = E_{ij} * (r_{ij} - r_{in})$	$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1744.50	(1,480.01)	(224.96)	39.53
Pertambangan dan Penggalian	305.90	(407.29)	119.23	17.84
Industri Pengolahan	1294.16	379.36	(196.51)	1477.01
Pengadaan Listrik dan Gas	3.35	(2.71)	2.94	3.58
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.96	2.66	1.65	8.27
Konstruksi	429.11	(21.91)	(7.91)	399.29
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	799.58	109.96	315.62	1225.16
Transportasi dan Pergudangan	96.38	(83.96)	125.39	137.81
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	137.69	(42.43)	(17.80)	77.46
Informasi dan Komunikasi	450.48	784.20	198.48	1433.16
Jasa Keuangan dan Asuransi	135.98	(20.60)	10.73	126.11
Real Estat	87.51	49.83	(7.51)	129.83
Jasa Perusahaan	20.27	(6.55)	5.64	19.35
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	214.20	(78.80)	(5.04)	130.36
Jasa Pendidikan	322.45	164.08	(24.49)	462.04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	46.88	71.59	(30.08)	88.39
Jasa lainnya	72.20	(62.38)	(9.26)	0.56
Total	6164.60	(644.96)	256.11	5775.75

Sumber: Lampiran 3 (data diolah)

Dari tabel 4.4 di atas terlihat bahwa seluruh sektor perekonomian Kabupaten Jember selama periode 2017-2021 memiliki nilai positif dengan total sebesar Rp 5.775,75 miliar dimana sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor industri pengolahan sebesar Rp 1.477,01 miliar.

Kenaikan dan penurunan beberapa sektor tentunya dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, pengaruh bauran industri dan pengaruh keunggulan kompetitif, untuk lebih jelasnya dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur (Nij)

Pengaruh pertumbuhan ekonomi seluruh sektor di Provinsi Jawa Timur terhadap pertumbuhan ekonomi seluruh sektor Kabupaten Jember memberikan kontribusi positif sebesar Rp 6164.60 miliar. Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor di Kabupaten Jember dibandingkan dengan sektor-sektor ditingkat provinsi menunjukkan bahwa secara rata-rata sektor yang berada ditingkat provinsi relatif lebih tinggi dari sektor-sektor yang berada di kabupaten.

2. Pengaruh Bauran Industri (Mij)

Pengaruh bauran industri atau komponen pergeseran proporsional dalam perekonomian di Provinsi Jawa Timur memberikan pengaruh negatif terhadap PDRB Kabupaten Jember. Besaran komponen pergeseran ini bernilai negatif yaitu Rp (644,96) miliar. Apabila dilihat dari output yang dihasilkan bauran industri sepuluh sektor memiliki nilai negatif dan tujuh lainnya mempunyai nilai positif. Sektor-sektor yang memiliki nilai positif mempunyai arti bahwa tingkat pertumbuhannya lebih cepat dari sektor ekonomi secara keseluruhan sedangkan

nilai negatif memiliki arti bahwa sektor tersebut mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih lambat dari pertumbuhan sektor ekonomi secara keseluruhan.

3. Pengaruh Keunggulan Kompetitif (Cij)

Pengaruh komponen keunggulan kompetitif atau komponen pergeseran differensial sektor secara keseluruhan mempunyai nilai positif dengan total sebesar Rp 256.11 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember relatif cepat dengan pertumbuhan sektor yang sejenis di Provinsi Jawa Timur karena hasilnya yang bernilai positif.

4.2.4 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) merupakan modifikasi dari model *Shift Share* dimana hasil yang diperoleh dengan metode *Shift Share* adalah hasil angka riil yang terdiri dari kontribusi dan pertumbuhan, sedangkan yang dihasilkan oleh model MRP dalam bentuk angka koefisien. Analisis Model Rasio Perumbuhan (MRP) bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan setiap sektor dimasing-masing wilayah baik Kabupaten maupun Provinsi. Model rasio pertumbuhan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu rasio pertumbuhan wilayah referensi (RPr) dan rasio pertumbuhan wilayah studi (RPs). Pada penelitian ini wilayah referensi adalah Provinsi Jawa Timur dan wilayah studi adalah Kabupaten Jember.

Kategori angka koefisien merupakan pertumbuhan aktivitas positif (+) atau negatif (-). RPr atau Rps akan mempunyai nominal positif (+)

apabila nilai RPr atau RPs lebih dari satu ($RPr/s > 1$). Sebaliknya jika RPr atau RPs kurang dari satu ($RPr/s < 1$) maka RPr atau RPs tersebut memiliki nominal negatif (-). Untuk mengetahui hasil analisis Model Rasio Pertumbuhan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan MRP Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember 2017-2021

Sektor		Model Rasio Pertumbuhan (MRP)			
		RPr		RPs	
		R	N	R	N
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.15	-	0.02	-
B	Pertambangan dan Penggalian	(0.33)	-	0.06	-
C	Industri Pengolahan	1.29	+	1.22	+
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.19	-	1.14	+
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.67	+	2.23	+
F	Konstruksi	0.95	-	0.99	-
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.14	+	1.64	+
H	Transportasi dan Pergudangan	0.13	-	1.53	+
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.69	-	0.60	-
J	Informasi dan Komunikasi	2.74	+	3.40	+
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.85	-	0.99	-
L	Real Estat	1.57	+	1.58	+
M,N	Jasa Perusahaan	0.68	-	1.02	+
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.63	-	0.65	-
P	Jasa Pendidikan	1.51	+	1.53	+
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.53	+	2.01	+
R,S, T,U	Jasa lainnya	0.14	-	0.01	-

Sumber: Lampiran 4 (data diolah)

Untuk mengkombinasikan hasil RPr dan RPs bisa diklasifikasikan gambaran kegiatan ekonomi Kabupaten Jember dengan cara empat klasifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Klasifikasi 1, apabila nilai RPr (+) dan nilai RPs (+) berarti kegiatan tersebut baik pada wilayah referensi maupun wilayah studi mempunyai pertumbuhan yang menonjol. Dapat dilihat dari tabel 4.5 maka sektor yang termasuk dalam klasifikasi tersebut adalah (1) Sektor Industri Pengolahan, (2) Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (4) Sektor Informasi dan Komunikasi, (5) Sektor Real Estat, (6) Sektor Jasa Pendidikan, dan (7) Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
2. Klasifikasi 2, yaitu jika RPr (+) dan RPs (-) berarti kegiatan tersebut mempunyai pertumbuhan yang menonjol pada wilayah referensi dibandingkan dengan wilayah studi. Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa tidak ada sektor yang memenuhi klasifikasi tersebut.
3. Klasifikasi 3, apabila nilai RPr (-) dan RPs (+) dapat diartikan bahwa kegiatan tersebut menonjol pertumbuhannya di wilayah studi sedangkan di wilayah referensi pertumbuhannya tidak menonjol. Maka yang tergolong dari klasifikasi tersebut menurut tabel 4.5 adalah (1) Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, (2) Sektor Transportasi dan Pergudangan, dan (3) Sektor Jasa Perusahaan.

4. Klasifikasi 4, yaitu jika nilai RPr (-) dan RPs (-) berarti bahwa kegiatan tersebut tidak menonjol pertumbuhannya di wilayah referensi maupun wilayah studi. Yang termasuk dalam kategori tersebut adalah (1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (2) Sektor Pertambangan dan Penggalian, (3) Sektor Konstruksi, (4) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (5) Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, (6) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (7) Sektor Jasa lainnya.

4.2.5 Analisis *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR)

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) bertujuan untuk mengetahui efisiensi kegiatan investasi di suatu wilayah. Semakin efisien suatu sektor ekonomi maka semakin tinggi pula produktivitas sektor tersebut dalam memproduksi barang dan jasa. Produktivitas sektor yang tinggi mendorong produksi barang dan jasa lebih banyak sehingga merangsang dan mempercepat pertumbuhan output sektor tersebut.

Perhitungan ICOR dilakukan pada masing-masing sektor ekonomi sehingga dapat diketahui bagaimana tingkat efisiensi dari setiap sektor tersebut dengan cara membandingkan jumlah total stok modal (investasi) dengan total output di suatu daerah. Efisiensi investasi sektor dapat dilihat dari nilai rasio yang diperoleh, rasio antara investasi dengan produk yang dihasilkan disebut dengan nilai koefisien ICOR. Nilai koefisien ICOR merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah pembahan modal baru yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah satu unit output,

semakin rendah nilai koefisien ICOR suatu sektor maka semakin efisien kegiatan investasi yang dilakukan.

Hasil perhitungan ICOR yang diperoleh dengan metode standar yang ditunjukkan pada tabel biasanya relative sedikit lebih tinggi dari hasil perhitungan yang diperoleh dengan metode akumulasi. Metode standar tidak lepas dari pengaruh angka-angka ekstrem dan menyebabkan bias. Namun, metode standar dapat digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan subsector yang kurang efektif. Metode standar memungkinkan untuk memperhitungkan kelebihan kapasitas produksi yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Pemilihan metode perhitungan ICOR tergantung pada asumsi atau prediksi yang digunakan tentang situasi sebenarnya di lapangan. Selain itu, faktor daya tarik masing-masing sektor di mata investor serta berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah.

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan *ICOR* Sektor Potensial Kabupaten Jember 2017-2021

Sektor	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.93	18.99	6.67	44.60	6.00	16.24
Pertambangan dan Penggalian	2.59	2.67	7.19	(3.96)	3.97	2.49
Industri Pengolahan	2.00	2.54	2.23	(3.96)	1.51	0.86
Pengadaan Listrik dan Gas	1.18	2.28	3.22	49.70	5.13	12.30
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.21	2.67	2.66	3.80	2.30	2.73
Konstruksi	1.73	1.86	2.09	(2.80)	4.58	1.49
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.95	1.69	2.10	(3.95)	1.91	0.74
Transportasi dan Pergudangan	1.62	1.93	2.09	(3.20)	2.41	0.97
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.71	1.78	1.74	(1.40)	2.90	1.34

Informasi dan Komunikasi	2.03	2.43	1.93	1.94	2.37	2.14
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.56	2.42	3.49	202.02	4.27	42.95
Real Estat	2.74	2.62	2.59	5.08	7.62	4.13
Jasa Perusahaan	1.86	1.96	2.01	(6.70)	5.03	0.83
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.05	2.05	2.98	12.41	(26.87)	(1.27)
Jasa Pendidikan	2.71	2.68	2.44	4.37	11.36	4.71
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.81	1.97	1.92	1.83	76.22	16.75
Jasa lainnya	3.20	2.53	2.53	(1.25)	2.50	1.90

Sumber: Lampiran 5

Angka ICOR pada tabel 4.6 di atas merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan metode standar dan diasumsikan produksi berada pada kondisi *full capacity* sehingga investasi yang ditanamkan digunakan untuk untuk menaikkan output sepenuhnya.

Tabel 4.6 memperlihatkan hasil perhitungan nilai ICOR dari sektor-sektor di Kabupaten Jember dari tahun 2017-2021. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa salah satu dari seluruh sektor tersebut memiliki nilai negatif yaitu sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai koefisien rata-rata sebesar (-1,27) hal ini terjadi karena pada tahun 2021 jumlah output yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan demikian investasi pada tahun tersebut masih belum efisien. Disusul dengan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Industri Pengolahan dengan nilai ICOR masing-masing sebesar 0,74 dan 0,86. Kedua sektor tersebut mempunyai nilai koefisien ICOR yang rendah hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut telah efisien

dalam menghasilkan barang dan jasa serta membutuhkan investasi yang relatif kecil untuk memproduksi satu unit barang dan jasa.

Kemudian dua sektor lainnya memiliki nilai yang cukup tinggi dengan rata-rata nilai ICOR sebesar 16,24 untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sedangkan untuk sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mempunyai nilai sebesar 16,75. Sedangkan nilai tertinggi sebesar 42,95 pada sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. Dengan nilai ICOR yang tinggi dapat disimpulkan bahwa ketiga sektor tersebut kurang efisien untuk penanaman investasi karena memerlukan investasi yang lebih banyak untuk menghasilkan satu unit barang dan jasa.

4.2.6 Kebutuhan Investasi Sektor Potensial

Teori Harrod-Dommar mengatakan bahwa investasi merupakan instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat meningkatkan jumlah output dari sisi permintaan dan penawaran. Kegiatan investasi memberikan dampak positif terhadap kapasitas produksi sehingga kegiatan perekonomian akan berjalan lebih baik. Investasi juga mampu merangsang terciptanya lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat sehingga akan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember perlu diketahui berapa besar investasi yang dibutuhkan. Kebutuhan investasi perlu diketahui agar target pertumbuhan ekonomi yang diupayakan oleh Kabupaten Jember berjalan dengan lancar. Kebutuhan

investasi dapat hitung dengan cara mengalikan nilai koefisien ICOR dengan perubahan output yang dicapai. Hasil perhitungan ini mengarah pada investasi minimum yang harus dilakukan oleh suatu daerah untuk mencapai target pertumbuhan. Pemerintah Kabupaten Jember juga perlu mengkaji ulang alokasi investasi dengan tujuan untuk menghindari ketidakefektifan kegiatan investasi tersebut. Karena pengalokasian investasi yang tidak tepat akan mengurangi keuntungan (profit) yang akan diperoleh oleh investor dan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember. Dengan demikian, mengetahui sektor-sektor yang memiliki potensi untuk memberikan keuntungan atau profit yang lebih tinggi di Kabupaten Jember sangatlah diperlukan.

Kabupaten Jember mempunyai enam sektor potensial yang memiliki spesialisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur pada sektor yang sama. Produksi sektor-sektor ini memungkinkan untuk bersaing dengan sektor yang sama di daerah lain. Sektor-sektor tersebut adalah sektor yang dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Oleh karena itu, alokasi dana investasi pada sektor-sektor potensial tersebut dapat menawarkan keuntungan dan pengembalian yang lebih tinggi, sehingga sektor-sektor ini harus diprioritaskan untuk investasi.

Tabel 4.7 Kebutuhan Investasi Sektor Potensial Kabupaten Jember Tahun 2022 (miliar rupiah)

Sektor Potensial	PDRB 2021	Rata-rata Nilai ICOR	Pertumbuhan 1% (miliar rupiah)	Kebutuhan Investasi 2022 (miliar rupiah)
Industri Pengolahan	17131.11	0.86	17302.42	14,942.16
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11561.53	0.74	11677.15	8,647.71
Informasi dan Komunikasi	5936.45	2.14	5995.81	12,818.54
Real Estat	1144.31	4.13	1155.75	4,775.48
Jasa Pendidikan	4783.75	4.71	4831.59	22,768.51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	701.76	16.75	708.78	11,870.67

Sumber: Lampiran 6

Tabel 4.7 memaparkan kebutuhan investasi dari enam sektor potensial yang ada di Kabupaten Jember. Pada sektor industri pengolahan misalkan, untuk meningkatkan pertumbuhan sebesar 1% maka sektor tersebut membutuhkan investasi sebesar Rp 14.942,16 miliar. Dari perhitungan di atas dapat membantu pemerintah Kabupaten Jember dalam memprediksi kebutuhan investasi untuk tahun-tahun selanjutnya.

4.3 Interpretasi Hasil Penelitian

4.3.1 Sektor Potensial Kabupaten Jember

Hasil analisis yang telah diperoleh dengan menggunakan alat analisis *Location Quotient* (LQ), *Shift Share* (SS), dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) selanjutnya diberi bobot atau nilai untuk memperoleh peringkat dan gambaran tentang sektor-sektor ekonomi yang potensial sebagaimana nampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8 Hasil Pembobotan Berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ), *Shift Share* (SS), dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Kabupaten Jember Tahun 2017-2021

No	Sektor	LQ	Nilai	Shift Share (Dij)	Nilai	MRP (RPs)	Nilai	Total Nilai	Ranking
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.54	17	39.53	6	0.02	2	25	11
2	Pertambangan dan Penggalian	0.94	12	17.84	4	0.06	3	19	13
3	Industri Pengolahan	0.71	6	1477.01	17	1.22	10	33	5
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.19	1	3.58	2	1.14	9	12	16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.68	5	8.27	3	2.23	16	24	12
6	Konstruksi	0.77	8	399.29	13	0.99	7	28	8
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.73	7	1225.16	15	1.64	14	36	3
8	Transportasi dan Pergudangan	0.57	4	137.81	12	1.53	11	27	9
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.42	2	77.46	7	0.60	4	13	15
10	Informasi dan Komunikasi	1.32	14	1433.16	16	3.40	17	47	1
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.87	11	126.11	9	0.99	6	26	10
12	Real Estat	0.84	10	129.83	10	1.58	13	33	5
13	Jasa Perusahaan	0.43	3	19.35	5	1.02	8	16	14
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.61	15	130.36	11	0.65	5	31	7
15	Jasa Pendidikan	2.00	16	462.04	14	1.53	12	42	2
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.15	13	88.39	8	2.01	15	36	3
17	Jasa lainnya	0.82	9	0.56	1	0.01	1	11	17

Sumber: Hasil *Location Quotient*, *Shift Share* dan Model Ratio Pertumbuhan (diolah)

Pada tabel di atas dapat dilihat peringkat atau *ranking* masing-masing sektor hasil pembobotan berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ), *Shift Share* (SS), dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dimana berdasarkan hasil pembobotan terdapat enam sektor yang

merupakan sektor potensial Kabupaten Jember dan peringkat tertinggi adalah sektor yang paling potensial.

Peringkat tertinggi yaitu sektor Informasi dan Komunikasi yang berarti bahwa sektor tersebut merupakan sektor paling potensial yang dimiliki Kabupaten Jember dengan nilai $LQ > 1$ yaitu sebesar 1,32 dan berdasarkan analisis *Shift Share* (SS) memberikan kontribusi pada PDRB Kabupaten Jember sebanyak Rp 1.433,16 miliar dan mempunyai nilai RPs sebesar 3,40 yang mana pertumbuhan sektor tersebut menonjol di Kabupaten Jember. Di era globalisasi saat ini, sektor Informasi dan Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian Kabupaten Jember. Sektor tersebut menjadi salah satu indikator kemajuan suatu daerah, khususnya layanan telekomunikasi. Sektor ini berperan dalam produksi dan penyebaran informasi dengan menyediakan alat untuk mendistribusikan produk dari sektor lain, menyediakan informasi tentang produk industri lain serta terlibat dalam kegiatan komunikasi lainnya. Sektor Informasi dan Komunikasi mempunyai andil sebesar 7,32% terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Jember pada tahun 2021. Kontribusi sektor ini cukup kecil dibandingkan dengan kontribusi sektor lain, namun pertumbuhannya selalu stabil dari tahun 2017 hingga 2021 dengan rata-rata kontribusi sektor ekonomi sebesar 6,67%

Peringkat kedua yaitu sektor Jasa Pendidikan dengan nilai $LQ > 1$ yaitu sebesar 2,00 dan berkontribusi sebesar Rp 462,04 miliar yang mana lebih besar dari pada Provinsi Jawa Timur dengan total Rp 322,44 miliar.

Sektor ini mencakup kegiatan pendidikan dari berbagai tingkatan dan terkait dengan profesi yang berbeda, baik lisan maupun tulisan dan dengan sarana komunikasi yang berbeda. Kategori ini juga mencakup penawaran pendidikan di berbagai tingkatan yang disediakan oleh berbagai institusi dalam sistem sekolah umum, seperti pendidikan orang dewasa, program literasi, dan lainnya. Ini juga termasuk akademi dan sekolah militer, sekolah penjara dan lainnya, tergantung pada levelnya. Untuk setiap jenjang pendidikan pertama, kelompok ini mencakup pendidikan khusus, termasuk siswa penyandang disabilitas intelektual atau fisik. Kategori ini mencakup pendidikan dan pelatihan publik dan swasta, terutama terkait dengan olahraga dan kegiatan rekreasi dan kegiatan pendukung pendidikan. Pelatihan dapat dilakukan di dalam ruangan, melalui siaran radio dan televisi, Internet, dan korespondensi. Sektor ini memberikan kontribusi sektor ekonomi dari tahun 2017 hingga 2021 sebesar masing-masing 5,76%, 5,79%, 5,84%, 6,19%, dan 5,90% dengan rata-rata 5,90% serta memiliki nilai RPs sebesar 1,53 menunjukkan bahwa sektor tersebut mempunyai pertumbuhan menonjol.

Berada di urutan ketiga yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki nilai RPs dengan nominal positif sebesar 1,64 hal ini berarti bahwa pertumbuhan sektor tersebut sangat baik. Pada tahun 2017 hingga 2019 terus mengalami peningkatan sebesar 13,22%, 13,87% dan 14,20% lalu mengalami penurunan menjadi 13,78% di tahun 2020, kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021

menjadi 14,26%. Dari hasil analisis *Shift Share* (SS) sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar Rp 1.225,16 miliar. Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi atau lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang dan memberikan imbalan atas jasa yang berkaitan dengan penjualan barang tersebut. Baik perdagangan besar (grosir) maupun eceran merupakan langkah terakhir dalam pendistribusian barang. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Penjualan tanpa modifikasi teknis juga mencakup kegiatan komersial seperti penyortiran, pemesanan dan perakitan barang, pencampuran, pembotolan, pengemasan, pembongkaran dari format besar dan pengemasan ke dalam format yang lebih kecil, penyimpanan dingin atau tidak, pembersihan dan pengeringan produk pertanian, pemotongan kayu atau lembaran logam.

Selanjutnya Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang memiliki nilai pembobotan yang sama dengan sektor sebelumnya, berdasarkan hasil analisis *Shift Share* (SS) sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar Rp 88,39 miliar yang cukup besar apabila dibandingkan dengan output provinsi yang hanya sebesar Rp 46,87 miliar. Sejalan dengan kategori sektor potensial berdasarkan dengan alat analisis *Location Quotient* (LQ) sektor tersebut mempunyai nilai $LQ > 1$ yaitu sebesar 1,15 serta memiliki nilai RPs yang cukup tinggi yaitu 2,01. Sektor tersenut merupakan kegiatan yang termasuk cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan

fasilitas kesehatan lain, sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional.

Kemudian berada di peringkat selanjutnya adalah sektor Industri Pengolahan dan sektor Real Estate, keduanya memiliki nilai pembobotan yang sama dan mempunyai nilai RPs lebih dari satu yaitu masing-masing 1,22 dan 1,58 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan kedua sektor tersebut di Kabupaten Jember menonjol dan tidak kalah dengan pertumbuhan wilayah referensi atau Provinsi Jawa Timur. Walaupun mempunyai nilai $LQ < 1$, kedua sektor tersebut memiliki output yang lebih besar dibandingkan dengan output Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar Rp 1.477,01 untuk sektor Industri Pengolahan dan Rp 129,83 miliar untuk sektor Real Estate.

Sektor Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi atau lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan, sebagaimana hasil industri pengolahan lainnya, berasal dari hasil pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian. Perubahan, pembaharuan atau konversi barang utama umumnya diperlakukan sama dengan industri pengolahan. Yang dimaksud dengan unit industri pengolahan adalah pabrik, mesin atau perangkat yang digunakan terutama dengan bantuan mesin dan tangan. Sedangkan sektor Real Estate mencakup kegiatan penyewa, perantara dan/atau perantara/agen dalam penjualan atau pembelian real estat, penyewaan real estat dan

penyediaan jasa real estat lainnya, seperti jasa penilai real estat atau bertindak sebagai agen real estat. Kegiatan yang termasuk dalam kategori ini dapat dilakukan pada properti milik sendiri atau milik orang lain, berdasarkan remunerasi atau kontrak. Termasuk kegiatan pembangunan rumah yang berhubungan dengan pemeliharaan atau persewaan bangunan. Kategori ini termasuk properti. Real estate adalah properti berupa tanah dan bangunan.

4.3.2 Analisis ICOR Sektor Potensial Kabupaten Jember

Perhitungan ICOR dilakukan pada masing-masing sektor ekonomi sehingga dapat diketahui bagaimana tingkat efisiensi dari setiap sektor tersebut dengan cara membandingkan jumlah total stok modal (investasi) dengan total output di suatu daerah. Efisiensi investasi sektor dapat dilihat dari nilai rasio yang diperoleh, rasio antara investasi dengan produk yang dihasilkan disebut dengan nilai koefisien ICOR. Nilai koefisien ICOR merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah pembahan modal (modal) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah satu unit output, semakin rendah nilai koefisien ICOR suatu sektor maka semakin efisien kegiatan investasi yang dilakukan.

Penempatan alokasi investasi sangat penting untuk mendukung keberhasilan kegiatan investasi yang dilakukan. Sebelum seorang investor mengambil keputusan investasi, investor akan mempertimbangkan beberapa hal. Investor memilih investasi dana pada sektor yang tepat agar

tidak mengalami kerugian di kemudian hari. Sektor-sektor potensial daerah dapat menjadi alternatif bagi investor untuk berinvestasi di daerah.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kabupaten Jember mempunyai enam sektor potensial. Sektor potensial adalah sektor basis dengan spesialisasi lebih tinggi apabila dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat provinsi. Sektor potensial juga merupakan sektor basis yang produknya tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut dapat diekspor dan dapat menghasilkan pendapatan dari luar daerah.

Tabel 4.6 memperlihatkan nilai ICOR dari seluruh sektor yang ada di Kabupaten Jember, enam diantaranya adalah sektor potensial. Nilai koefisien ICOR dari masing-masing sektor potensial yaitu (1) Sektor Industri Pengolahan (0,86), (2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (0,74), (3) Sektor Informasi dan Komunikasi (2,14), (4) Sektor Real Estat (4,13), (5) Sektor Jasa Pendidikan (4,71), (6) Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (16,75).

Dari enam sektor potensial yang ada di Kabupaten Jember, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor unggulan yang memiliki nilai ICOR paling rendah sebesar 0,74. Hal ini berarti bahwa sektor tersebut membutuhkan unit investasi sebesar 0,74 untuk menghasilkan satu unit output. Sektor tersebut adalah sektor yang paling efisien dari sektor potensial lainnya.

Sedangkan untuk sektor potensial yang memiliki nilai ICOR paling tinggi yaitu sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sektor tersebut memiliki nilai ICOR 16,75. Sektor ini membutuhkan unit investasi sebesar 16,75 untuk menghasilkan satu unit output. Sektor ini menjadi sektor potensial yang kurang efisien karena membutuhkan investasi yang besar hanya untuk menghasilkan satu unit output.

Apabila ditelaah lebih dalam, ternyata tidak semua sektor potensial di Kabupaten Jember memiliki nilai ICOR yang rendah, artinya tidak semua sektor potensial memiliki kinerja yang baik dalam hal investasi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor potensial juga memerlukan investasi yang besar agar sektor tersebut dapat berkembang dan mengalami pertumbuhan.

4.3.3 Analisis Kebutuhan Investasi Sektor Potensial Kabupaten Jember

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember 2021 sebesar 4,00% maka diasumsikan bahwa pemerintah Kabupaten Jember menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9%-6,5% dari tahun 2023 hingga 2027. Oleh karena itu, diperlukan peran sektor potensial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember yang memiliki target sebesar 6,5%. Peningkatan nilai total investasi dapat menjadi salah satu rencana strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember pada tahun 2027. Agar sektor-sektor potensial dapat memacu pertumbuhan ekonomi maka perlu diketahui kebutuhan investasi minimum dari masing-masing sektor potensial yang ada di Kabupaten Jember.

Tabel 4.9 Kebutuhan Investasi Sektor Potensial Kabupaten Jember Tahun 2023-2027 (miliar rupiah)

Sektor Potensial	Kebutuhan Investasi 2023 (4,9%)	Kebutuhan Investasi 2024 (5,3%)	Kebutuhan Investasi 2025 (5,7%)	Kebutuhan Investasi 2026 (6,1%)	Kebutuhan Investasi 2027 (6,5%)
Industri Pengolahan	724.92	784.09	843.27	902.45	961.62
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	419.54	453.79	488.04	522.29	556.54
Informasi dan Komunikasi	621.89	672.66	723.42	774.19	824.96
Real Estat	231.68	250.59	269.51	288.42	307.33
Jasa Pendidikan	1,104.61	1,194.78	1,284.96	1,375.13	1,465.30
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	575.90	622.92	669.93	716.94	763.95

Sumber: Lampiran 7

Tabel 4.9 memaparkan kebutuhan minimal investasi jika setiap sektor potensial mengalami pertumbuhan sebesar 4,9% untuk tahun 2023, sebesar 5,3% pada tahun 2024, sebesar 5,7% untuk tahun 2025, untuk tahun 2026 sebesar 6,1% dan tahun 2027 sebesar 6,5%. Namun pertumbuhan ekonomi dari setiap sektor potensial belum tentu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebesar target yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu dihitung terlebih dahulu berapa kebutuhan investasi Kabupaten Jember tahun 2023-2027.

Targetkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember pada tahun 2027 sebesar 6,5%, maka total output harus mencapai Rp 115,323.89 miliar dan total investasi yang dibutuhkan sebesar Rp 36,882.57 miliar.

Tabel 4.10 Kebutuhan Investasi Sektor Potensial untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 6.5% (miliar rupiah).

Sektor Potensial	Kebutuhan Investasi 2027 (6,5%)
Industri Pengolahan	1,479.42
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	856.21
Informasi dan Komunikasi	1,269.16
Real Estat	472.82
Jasa Pendidikan	2,254.31
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,175.31

Sumber: Lampiran 8

Tabel 4.10 memaparkan kebutuhan investasi dari setiap sektor potensial untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 sebesar 6,5%. Untuk mencapai target tersebut dari setiap sektor potensial di Kabupaten Jember harus tumbuh sebesar 10,00% pada tahun 2027 dan menggunakan asumsi bahwa pertumbuhan sektor lain (sektor non potensial) tetap.

Tabel 4.11 Pertumbuhan Sektor Ekonomi Non Potensial Kabupaten Jember

Sektor	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29.09%	27.49%	26.93%	26.91%	26.01%	27.29%
Pertambangan dan Penggalian	4.43%	4.45%	4.27%	4.14%	4.07%	4.27%
Pengadaan Listrik dan Gas	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%
Konstruksi	7.83%	8.12%	8.32%	7.93%	7.74%	7.99%
Transportasi dan Pergudangan	1.72%	1.78%	1.83%	1.75%	1.78%	1.77%

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.33%	2.43%	2.54%	2.28%	2.28%	2.37%
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.37%	2.40%	2.37%	2.41%	2.36%	2.38%
Jasa Perusahaan	0.35%	0.36%	0.38%	0.37%	0.36%	0.36%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.47%	3.56%	3.54%	3.65%	3.40%	3.52%
Jasa lainnya	1.08%	1.09%	1.10%	0.97%	0.98%	1.04%

Sumber: BPS Kabupaten Jember

Dengan pertumbuhan output sektor ekonomi non potensial tetap, maka total investasi yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp 36,882.57 miliar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember sebesar 6,5% pada tahun 2027.

Tabel 4.12 Kebutuhan Total Investasi Kabupaten Jember Tahun 2027 (miliar rupiah)

Sektor Ekonomi	Output 2027	Pertumbuhan Output 2027	Investasi 2027
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	43,348.24	27.29%	22,258.78
Pertambangan dan Penggalian	3,830.89	4.27%	534.44
Industri Pengolahan	18,092.73	10.00%	1,479.42
Pengadaan Listrik dan Gas	70.36	0.05%	31.26
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	68.36	0.07%	10.30
Konstruksi	6,883.85	7.99%	609.03
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,118.07	10.00%	856.21
Transportasi dan Pergudangan	1,531.58	1.77%	90.91
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,012.73	2.37%	161.58
Informasi dan Komunikasi	6,761.41	10.00%	1,269.16
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,247.34	2.38%	5,336.06
Real Estat	1,451.64	10.00%	472.82
Jasa Perusahaan	308.62	0.36%	15.87
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,988.03	3.52%	228.61

Jasa Pendidikan	6,249.05	10.00%	2,254.31
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,465.71	10.00%	1,175.31
Jasa lainnya	895.26	1.04%	98.48
Total	115,323.89		36,882.57

Sumber: Lampiran 9

Angka ICOR yang dipergunakan di sini adalah hasil perhitungan dengan metode standar dan pendekatan investasi sama dengan PMTB. Dengan koefisien ICOR tersebut, pada tabel berikut disajikan skenario kebutuhan investasi untuk tahun 2027. Sebagai ilustrasi untuk skenario pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% maka diperlukan investasi sebesar Rp 36.882,57 miliar dengan output Rp 115.323,89 miliar di tahun 2027. Serta seluruh sektor potensial harus mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 10% untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5%. Kebutuhan investasi tersebut. Tentunya kebutuhan investasi tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemertintah Kabupaten Jember karena anggaran Pemerintah Kabupaten Jember relative terbatas. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Jember harus menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi swasta dan rumah tangga di dalam dan luar kota bahkan luar negeri.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis Kebutuhan Investasi Sektor Potensial Dalam Rangka Mendorong Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2023-2027” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat enam sektor potensial di Kabupaten Jember dari hasil pembobotan berdasarkan analisis *Location Quotient (LQ)*, *Shift Share (SS)*, dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) yaitu (1) Sektor Informasi dan Komunikasi, (2) Sektor Jasa Pendidikan, (3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (4) Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, (5) Sektor Industri Pengolahan, (6) Sektor Real Estat.
2. Berdasarkan hasil analisis ke enam sektor potensial mempunyai kegiatan ekonomi yang positif. Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor potensial yang dimiliki Kabupaten Jember dibandingkan dengan enam sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa semua sektor potensial Kabupaten Jember lebih tinggi dari sektor-sektor yang ada di tingkat Provinsi. Hal tersebut membuktikan bahwa pertumbuhan ke enam sektor potensial menonjol dan dapat ditingkatkan untuk periode selanjutnya.

3. Investasi yang diperlukan apabila target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember sebesar 6,5% pada tahun 2027 maka (1) Sektor Industri Pengolahan membutuhkan investasi sebesar Rp 1.479,42 miliar, (2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor membutuhkan investasi sebesar Rp 856,21 miliar, (3) Sektor Informasi dan Komunikasi membutuhkan investasi sebesar Rp 1.269,16 miliar, (4) Sektor Real Estat membutuhkan investasi sebesar Rp 472,82 miliar, (5) Sektor Jasa Pendidikan membutuhkan investasi sebesar Rp 2.254,31 miliar, (6) Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial membutuhkan investasi sebesar Rp 1.175,31 miliar.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian maka didapat implikasi bahwa investasi merupakan salah satu indikator yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pengalokasian dana investasi harus tepat agar bisa mendapatkan profit yang tinggi. Sektor-sektor potensial daerah dapat menjadi alternatif bagi investor untuk berinvestasi di daerah. Karena berinvestasi pada sektor-sektor potensial tersebut dapat menawarkan keuntungan dan pengembalian yang lebih tinggi, sehingga sektor-sektor ini harus diprioritaskan untuk investasi.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Kebutuhan Investasi Sektor Potensial Dalam Rangka Mendorong Tingkat

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2023-2027” maka dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Untuk masyarakat, pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.
2. Untuk Pemerintah Kabupaten Jember, agar pembangunan daerah Kabupaten Jember dapat berjalan lebih baik, Pemerintah Kabupaten Jember harus menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan potensi ekonominya dengan mengembangkan sektor potensial. Untuk menghindari kesenjangan dan ketimpangan antar sektor, Pemerintah Kabupaten Jember harus memanfaatkan sektor potensial yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan daerah yang dapat mendorong munculnya investasi-investasi baru, seperti kemudahan perizinan dan melakukan pemetaan tata ruang atau kawasan yang mendukung investasi.
3. Untuk Almamater, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang yang sama serta untuk menambah koleksi kepustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhempri, R. R., Zainal, H., & Kusumastuti, S. Y. (2014). Keterkaitan Sektor-Sektor Ekonomi Potensial di Provinsi Riau. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 30(1), 62-71.
- Almulaibari, H., & WOYANTI, N. (2011). *Analisis potensi pertumbuhan ekonomi kota Tegal tahun 2004-2008* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Antara, M. (2007). Kebutuhan Investasi Sektor Basis dan Non Basis dalam Perekonomian Regional Bali. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*.
- Astiaratie, T. (2010). Analisis kebutuhan investasi sektor-sektor ekonomi unggulan dalam upaya peningkatan kesempatan kerja di kota Surakarta.
- Badan Pusat Statistik Jember. (2018). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Menurut Pengeluaran 2013 - 2017. Jember: Badan Pusat Statistik Jember.
- Badan Pusat Statistik Jember. (2021). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Menurut Lapangan Usaha 2016-2020. Jember: Badan Pusat Statistik Jember.
- Badan Pusat Statistik Jember. (2022). Kabupaten Jember Dalam Angka 2022. Jember: Badan Pusat Statistik Jember.
- Badan Pusat Statistik Jember. (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Menurut Pengeluaran 2017 - 2021. Jember: Badan Pusat Statistik Jember.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok. (2011). Investasi dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Solok Tahun 2000-2010. Solok: BPS Kabupaten Solok. 3.
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. (2017), ICOR SEKTORAL KOTA YOGYAKARTA 2016. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2022). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2017-2021. Jember: BPS Provinsi Jawa Timur
- Badan Pusat Statistik. (2023). Metodologi. Badan Pusat Statistik Indonesia <https://www.bps.go.id/subject/171/produk-domestik-regional-bruto--pengeluaran-.html#subjekViewTab2> diakses pada 8 Juli 2023
- Cahyono, A. D., Jumiati, A., & Yunitasari, D. (2021). Analisis Sektor Potensial Dalam Pengembangan Pembangunan Perekonomian Provinsi Gorontalo (Analysis of Potential Sectors in the Development of the Economic Development of Gorontalo Province). *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(3), 1-12.

- Fatihudin, D. (2019). *Membedah Investasi Manuai Geliat Ekonomi*. Deepublish.
- Hafzrianda, Y., Bisai, C. M., & Pajeru, A. R. (2012). Analisis Pertumbuhan dan Potensi Sektor. Pertanian dalam Perekonomian Kabupaten Jayawijaya. Tahun 2008–2012. diakses 21-5-2018.
- Haryanto, H. Analisis Transformasi Struktur Ekonomi 7 Provinsi di Wilayah Jawa dan Bali (Pendekatan LQ dan Shift Share). *Bappenas Working Papers*, 4(2), 178-200.
- Indrajaya, I. G. B., & Devi, I. A. W. P. (2014). Analisis Kebutuhan Investasi Sektor Potensial di Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(12), 44500.
- Jaya, A. H. (2022). Analisis sektor-sektor basis dan non basis perekonomian wilayah Kabupaten Banggai tahun 2014-2018. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 8(2), 481-487.
- Kamus Pembakuan Statistik. (2009). Industri Pengolahan. Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/klasifikasi/app/view/kbli2009/C> diakses pada 10 Juli 2023
- Kamus Pembakuan Statistik. (2009). Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/klasifikasi/app/view/kbli2009/Q> diakses pada 10 Juli 2023.
- Kamus Pembakuan Statistik. (2009). Jasa Pendidikan. Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/klasifikasi/app/view/kbli2009/P> diakses pada 10 Juli 2023.
- Kamus Pembakuan Statistik. (2009). Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/klasifikasi/app/kbli#kbli2009> diakses pada 10 Juli 2023.
- Kamus Pembakuan Statistik. (2009). Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor. Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/klasifikasi/app/view/kbli2009/G> diakses pada 10 Juli 2023.
- Kamus Pembakuan Statistik. (2009). Real Estat. Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/klasifikasi/app/view/kbli2009/L> diakses pada 10 Juli 2023.
- KUNTARA, T. (2016). Analisis Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Pulau Jawa.
- LIYAH, K. (2019). Analisis LQ (Location Quatient) dan SS (Shift-Share) pada Sektor-Sektor Kabupaten Jember Tahun 2010-2018 (Doctoral dissertation, IAIN Jember).

- Mangun, N. (2010). *Analisis potensi ekonomi kabupaten dan kota di propinsi sulawesi tengah* (Doctoral dissertation, UNDIP).
- Masloman, I. (2020). Analisa Perhitungan ICOR di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(02).
- Mujib, M. (2019). Analisis kebutuhan investasi sektor potensial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kabupaten Lamongan pada tahun 2020 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Murjoko, K., & Ferichani, M. (2020). Analisis Efisiensi dan Kebutuhan Investasi Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah. *Agrista*, 8(1), 8-17.
- Ngahu, S., Lapian, A. L. C. P., & Siwu, H. F. D. (2021). ANALISIS INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO SEKTOR UNGGULAN DI KOTA TOMOHON. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(5).
- Pamungkas, L. A. (2021). Analisis Sektor Unggulan Di Kabupaten Belitung Timur. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 9(2), 60-68.
- Putra, K. A. T., & Aswitari, L. P. (2013). Kebutuhan Investasi Sektor Basis Industri Per Kecamatan di Kabupaten Gianyar dalam Rangka One Village One Product. *E-Jurnal EP Unud*, (12).
- Putri, C. H., & Rustariyuni, S. D. (2012). Analisis Struktur Perekonomian Bali: Pendekatan Shift Share. *E-Jurnal EP Unud*, 3(1), 111-120.
- Qomariyah, S. (2015). ANALISIS POTENSI EKONOMI KABUPATENAN KUNINGAN <https://qomariyahsiti.blogspot.com/> diakses pada 12 Januari 2023.
- Rafa, S. R. (2022). Bagaimana Bentuk Penerapan Teori Investasi Keynesian <https://landx.id/blog/bagaimana-bentuk-penerapan-teori-investasi-keynesian/#:~:text=Teori%20investasi%20digunakan%20sebagai%20penyusun,portofolio%20dan%20menganalisa%20kinerja%20investasi> diakses pada 10 Juli 2023.
- RAHMAN, S. K. (2019). ANALISIS KEBUTUHAN INVESTASI SEKTOR UNGGULANDI KABUPATEN GOWA (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).
- Rappa, V. Y., Christoporus, C., & Rauf, R. A. (2023). Sektor Potensial yang Menunjang Perekonomian Kota Palu. *Agroland: Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian*, 30(1), 64-80.
- Rizani, A. (2017). Analisis potensi ekonomi di sektor dan subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Jember. *Jurnal ekonomi pembangunan*, 15(2), 137-156.
- Sondakh, C. V., & ROTINSULU, D. C. (2019). SEKTOR BASIS DAN KEBUTUHAN INVESTASI KOTA BITUNG DALAM MENGHADAPI

KAWASAN EKONOMI KHUSUS. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 18(7).

- Suparto, L. (2017). Analisis Investment Capital Output Ratio (ICOR) Dalam Rangka Proyeksi Kebutuhan Investasi Di Kabupaten Majalengka Tahun 2017-2019. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, 4(1).
- Susilowati, S. H., Hadi, P. U., Friyatno, S., Rachmat, M., Maulana, M., & Azis, M. (2012). Estimasi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) untuk Perencanaan Investasi dalam Rangka Pembangunan Sektor Pertanian. *Jurnal Agro Ekonomi*, 30(2), 159-182.
- Syaputra, A., Hardiani, H., & Bhakti, A. (2020). Analisis sektor unggulan di Kabupaten Batanghari. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 9(2), 91-100.
- Taringan, Robinson. (2005). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksra. 28-29.
- Trisnu, C. I. S. R., & Purbadharmaja, I. B. P. (2014). Pengaruh PMDN dan PMA terhadap PDRB di Provinsi Bali. *EJurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3, 88-95.
- Widodo, T. (2006). *Perencanaan pembangunan: aplikasi komputer (era otonomi daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 48.
- Wikantioso, W. (2020). EVALUASI DAN STRATEGI MENARIK INVESTASI DI KABUPATEN GARUT: ANALISIS INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO DAN SWOT. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 17(1), 1-15.
- Yamani, M. (2022). Analisis Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 16(1), 15-20.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jember 2017-2021

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,841.70	13,845.12	14,046.58	13,895.89	13,881.23
Pertambangan dan Penggalian	2,427.18	2,564.80	2,588.33	2,417.34	2,445.02
Industri Pengolahan	10,268.48	10,888.41	11,656.83	10,867.31	11,745.49
Pengadaan Listrik dan Gas	26.58	27.88	29.32	29.48	30.16
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	31.45	33.44	35.58	37.02	39.72
Konstruksi	3,404.78	3,667.65	3,995.00	3,725.62	3,804.07
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,344.25	6,875.84	7,410.80	6,990.66	7,569.41
Transportasi dan Pergudangan	764.71	822.19	892.77	838.74	902.52
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,092.51	1,191.21	1,309.02	1,135.42	1,169.97
Informasi dan Komunikasi	3,574.30	3,864.89	4,225.31	4,648.80	5,007.46
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,078.94	1,138.42	1,189.96	1,188.50	1,205.05
Real Estat	694.38	739.38	788.62	808.54	824.21
Jasa Perusahaan	160.82	172.46	185.24	176.38	180.17
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,699.56	1,816.49	1,872.52	1,830.95	1,829.92
Jasa Pendidikan	2558.47	2,717.99	2,903.62	2,976.29	3,020.51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	371.95	398.49	429.05	468.93	460.34
Jasa lainnya	572.90	605.86	641.49	550.69	573.46
Jumlah	48,912.96	51,370.52	54,200.04	52,586.56	54,688.71

Lampiran 2 PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Timur 2017-2021

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	167,360.57	163,799.94	165,951.23	167,630.20	170,558.53
Pertambangan dan Penggalian	80,636.38	82,573.56	83,847.02	80,895.86	77,267.91
Industri Pengolahan	434,114.16	466,908.04	498,740.30	488,444.60	504,864.57
Pengadaan Listrik dan Gas	4,599.54	4,499.00	4,561.03	4,451.89	4,711.10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,454.64	1,515.43	1,586.73	1,666.53	1,761.00
Konstruksi	136,136.39	145,140.20	153,689.59	148,652.44	152,417.90
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	273,213.40	290,136.30	307,440.92	289,706.70	312,382.42
Transportasi dan Pergudangan	43,835.33	46,712.45	48,471.40	43,466.26	44,547.40
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	79,202.19	85,237.50	91,659.39	83,548.62	86,108.36
Informasi dan Komunikasi	84,699.18	90,416.22	97,070.64	106,612.55	113,956.93
Jasa Keuangan dan Asuransi	38,064.50	39,859.92	41,374.53	41,449.26	42,135.04
Real Estat	25,247.60	26,823.05	28,441.50	29,565.69	30,241.30
Jasa Perusahaan	11,486.87	12,308.51	13,128.02	12,180.02	12,466.40
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	32,369.74	33,730.19	34,984.34	34,848.51	34,948.54
Jasa Pendidikan	38931.65	41,036.23	44,018.96	45,760.00	46,335.09
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,743.84	10,485.66	11,277.80	12,239.46	12,847.31
Jasa lainnya	21,203.59	22,259.62	23,652.24	20,389.19	21,567.09
Jumlah	1,482,299.57	1,563,441.82	1,649,895.64	1,611,507.78	1,669,116.89

Lampiran 3 Perhitungan *Shift Share* Kabupaten Jember 2017-2021 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	KABUPATEN		PROVINSI		rij	rin	rn
	2017	2021	2017	2021			
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,841.70	13,881.23	167,360.57	170,558.53	0.003	0.02	0.13
Pertambangan dan Penggalian	2,427.18	2,445.02	80,636.38	77,267.91	0.01	(0.04)	0.13
Industri Pengolahan	10,268.48	11,745.49	434,114.16	504,864.57	0.14	0.16	0.13
Pengadaan Listrik dan Gas	26.58	30.16	4,599.54	4,711.10	0.13	0.02	0.13
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	31.45	39.72	1,454.64	1,761.00	0.26	0.21	0.13
Konstruksi	3,404.78	3,804.07	136,136.39	152,417.90	0.12	0.12	0.13
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,344.25	7,569.41	273,213.40	312,382.42	0.19	0.14	0.13
Transportasi dan Pergudangan	764.71	902.52	43,835.33	44,547.40	0.18	0.02	0.13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,092.51	1,169.97	79,202.19	86,108.36	0.07	0.09	0.13
Informasi dan Komunikasi	3,574.30	5,007.46	84,699.18	113,956.93	0.40	0.35	0.13
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,078.94	1,205.05	38,064.50	42,135.04	0.12	0.11	0.13
Real Estat	694.38	824.21	25,247.60	30,241.30	0.19	0.20	0.13
Jasa Perusahaan	160.82	180.17	11,486.87	12,466.40	0.12	0.09	0.13
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,699.56	1,829.92	32,369.74	34,948.54	0.08	0.08	0.13
Jasa Pendidikan	2558.47	3,020.51	38931.65	46,335.09	0.18	0.19	0.13
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	371.95	460.34	9,743.84	12,847.31	0.24	0.32	0.13
Jasa lainnya	572.90	573.46	21,203.59	21,567.09	0.00	0.02	0.13
Jumlah	48,912.96	54,688.71	1,482,299.57	1,669,116.89			

**Lampiran 4 Perhitungan MRP Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember
2017-2021**

Lapangan Usaha		Model Rasio Pertumbuhan (MRP)			
		RPr (Jawa Timur)		RPs (Jember)	
		2017	2021	2017	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	167360.57	170558.53	13841.70	13881.23
B	Pertambangan dan Penggalian	80636.38	77267.91	2427.18	2445.02
C	Industri Pengolahan	434114.16	504864.57	10268.48	11745.49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4599.54	4711.1	26.58	30.16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1454.64	1761	31.45	39.72
F	Konstruksi	136136.39	152417.9	3404.78	3804.07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	273213.40	312382.42	6344.25	7569.41
H	Transportasi dan Pergudangan	43835.33	44547.4	764.71	902.52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	79202.19	86108.36	1092.51	1169.97
J	Informasi dan Komunikasi	84699.18	113956.93	3574.30	5007.46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	38064.50	42135.04	1078.94	1205.05
L	Real Estat	25247.60	30241.3	694.38	824.21
M,N	Jasa Perusahaan	11486.87	12466.4	160.82	180.17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	32369.74	34948.54	1699.56	1829.92
P	Jasa Pendidikan	38931.65	46335.09	2558.47	3020.51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9743.84	12847.31	371.95	460.34
R,S,T,U	Jasa lainnya	21203.59	21567.09	572.90	573.46
	Total	1482299.6	1669116.9	48913	54688.7

Lampiran 5 Hasil Perhitungan ICOR Sektor Potensial Kabupaten Jember 2017-2021

Sektor	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.93	18.99	6.67	44.60	6.00	16.24
Pertambangan dan Penggalian	2.59	2.67	7.19	(3.96)	3.97	2.49
Industri Pengolahan	2.00	2.54	2.23	(3.96)	1.51	0.86
Pengadaan Listrik dan Gas	1.18	2.28	3.22	49.70	5.13	12.30
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.21	2.67	2.66	3.80	2.30	2.73
Konstruksi	1.73	1.86	2.09	(2.80)	4.58	1.49
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.95	1.69	2.10	(3.95)	1.91	0.74
Transportasi dan Pergudangan	1.62	1.93	2.09	(3.20)	2.41	0.97
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.71	1.78	1.74	(1.40)	2.90	1.34
Informasi dan Komunikasi	2.03	2.43	1.93	1.94	2.37	2.14
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.56	2.42	3.49	202.02	4.27	42.95
Real Estat	2.74	2.62	2.59	5.08	7.62	4.13
Jasa Perusahaan	1.86	1.96	2.01	(6.70)	5.03	0.83
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.05	2.05	2.98	12.41	(26.87)	(1.27)
Jasa Pendidikan	2.71	2.68	2.44	4.37	11.36	4.71
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.81	1.97	1.92	1.83	76.22	16.75
Jasa lainnya	3.20	2.53	2.53	(1.25)	2.50	1.90

Lampiran 6 Kebutuhan Investasi Sektor Potensial Kabupaten Jember Tahun 2022 (miliar rupiah)

Sektor Potensial	PDRB 2021	Rata-rata Nilai ICOR	Pertumbuhan 1% (miliar rupiah)	Kebutuhan Investasi 2022 (miliar rupiah)
Industri Pengolahan	17131.11	0.86	17302.42	14,942.16
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11561.53	0.74	11677.15	8,647.71
Informasi dan Komunikasi	5936.45	2.14	5995.81	12,818.54
Real Estat	1144.31	4.13	1155.75	4,775.48
Jasa Pendidikan	4783.75	4.71	4831.59	22,768.51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	701.76	16.75	708.78	11,870.67

Lampiran 7 Kebutuhan Investasi Sektor Potensial Kabupaten Jember Tahun 2023-2027 (miliar rupiah)

Sektor Potensial	Kebutuhan Investasi 2023 (4,9%)	Kebutuhan Investasi 2024 (5,3%)	Kebutuhan Investasi 2025 (5,7%)	Kebutuhan Investasi 2026 (6,1%)	Kebutuhan Investasi 2027 (6,5%)
Industri Pengolahan	724.92	784.09	843.27	902.45	961.62
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	419.54	453.79	488.04	522.29	556.54
Informasi dan Komunikasi	621.89	672.66	723.42	774.19	824.96
Real Estat	231.68	250.59	269.51	288.42	307.33
Jasa Pendidikan	1,104.61	1,194.78	1,284.96	1,375.13	1,465.30
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	575.90	622.92	669.93	716.94	763.95

Lampiran 8 Kebutuhan Investasi Sektor Potensial untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 6.5% (miliar rupiah)

Sektor Potensial	Kebutuhan Investasi 2027 (6,5%)
Industri Pengolahan	1,479.42
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	856.21
Informasi dan Komunikasi	1,269.16
Real Estat	472.82
Jasa Pendidikan	2,254.31
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,175.31

**Lampiran 9 Kebutuhan Total Investasi Kabupaten Jember Tahun 2027
(miliar rupiah)**

Sektor Ekonomi	Output 2027	Pertumbuhan Output 2027	Investasi 2027
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	43,348.24	27.29%	22,258.78
Pertambangan dan Penggalian	3,830.89	4.27%	534.44
Industri Pengolahan	18,092.73	10.00%	1,479.42
Pengadaan Listrik dan Gas	70.36	0.05%	31.26
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	68.36	0.07%	10.30
Konstruksi	6,883.85	7.99%	609.03
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,118.07	10.00%	856.21
Transportasi dan Pergudangan	1,531.58	1.77%	90.91
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,012.73	2.37%	161.58
Informasi dan Komunikasi	6,761.41	10.00%	1,269.16
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,247.34	2.38%	5,336.06
Real Estat	1,451.64	10.00%	472.82
Jasa Perusahaan	308.62	0.36%	15.87
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,988.03	3.52%	228.61
Jasa Pendidikan	6,249.05	10.00%	2,254.31
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,465.71	10.00%	1,175.31
Jasa lainnya	895.26	1.04%	98.48
Total	115,323.89		36,882.57